



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

LAPORAN KINERJA
KPKNL SURABAYA
TAHUN 2021

KPKNL SURABAYA
TAHUN 2021



KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURABAYA

Wilayah Amanah Berintegritas Cepat dan Akuntabel - WANICAK



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki instansi vertikal di daerah menetapkan entitas selaku koordinator penyusunan Laporan Kinerja satuan kerja di wilayah yang bersangkutan. Laporan kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja KPKNL Surabaya pada Tahun 2021.

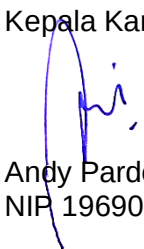
Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, KPKNL Surabaya telah menerapkan *Balanced Scorecard* (BSC) sebagai instrument dalam pengelolaan kinerja. *Performance* KPKNL Surabaya dinilai berdasarkan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sesuai dengan Kontrak Kinerja KPKNL Surabaya dengan Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur Tahun 2021. Oleh karena itu, pengukuran kinerja Tahun 2021 berdasarkan hasil capaian kinerja IKU berbasis BSC. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2021 diperoleh rata-rata capaian IKU Kemenkeu *Three* KPKNL Surabaya Tahun 2021 sebesar 111,59%. Hasil tersebut merupakan capaian seluruh kinerja KPKNL Surabaya sesuai dengan Peta Strategi KPKNL Surabaya Tahun 2021.

Dengan telah tersusunnya LAKIN KPKNL Surabaya ini, kami harapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan terhadap upaya pencapaian visi dan misi KPKNL Surabaya. Tuntutan kualitas layanan pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, penilaian dan pelaksanaan lelang harus dapat dijawab dengan perbaikan terus menerus dengan dilandasi Nilai-Nilai Organisasi yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan.

Kepada semua pihak yang telah bersinergi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas KPKNL Surabaya kami berikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Surabaya, 18 Januari 2022

Kepala Kantor


Andy Pardede
NIP 19690112 199501 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja KPKNL Surabaya Tahun 2021 disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*outcome*). Selain itu, laporan kinerja KPKNL Surabaya merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis.

Laporan kinerja mempunyai fungsi sebagai alat kendali, penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan masyarakat.

Mencermati tuntutan perkembangan organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang terus membenahi diri secara menyeluruh melalui perubahan dengan pendekatan fungsi, maka KPKNL Surabaya dituntut untuk secara aktif segera menyesuaikan diri agar dapat memenuhi tuntutan yang ada di masyarakat. Langkah konkrit yang diambil oleh KPKNL Surabaya tertuang dalam perencanaan strategis yang memuat visi, misi, nilai, dan renstra. Hal ini dimaksudkan dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara sistematis, terprogram dan berkesinambungan.

Agar KPKNL Surabaya dapat memenuhi harapan para *stakeholder* maka dibutuhkan visi yang menarik, realistis, dan ideal yang hendak dicapai oleh organisasi. Visi yang ditetapkan oleh KPKNL Surabaya sejalan dengan visi DJKN yaitu :

“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

Dalam menyatakan visi tersebut diharapkan seluruh pegawai dapat memahami dan menghayati sehingga mampu memotivasi kinerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan, KPKNL Surabaya memiliki 5 (lima) misi yang harus diemban dan dilaksanakan, yaitu :

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara.
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum.
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara.
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Seiring dengan perjalanan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, dengan mengacu pada visi dan misi tersebut, serta untuk mencapai tujuan yang akan diraih, maka dirumuskan sasaran strategis yang dituangkan dalam peta strategis. Pengukuran kinerja merupakan penilaian terhadap indikator kinerja utama (IKU) yang telah diidentifikasi untuk mencapai sasaran strategis dan tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi KPKNL Surabaya. Sesuai dengan Peta Strategi KPKNL Surabaya Tahun 2021, telah ditetapkan 10 (sepuluh) sasaran strategis dan 20 (dua puluh) IKU sebagai berikut:

1. SS : Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal

IKU : Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK tercapai sebesar 120,00%

IKU : Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang tercapai sebesar 104,42%

IKU : Persentase penurunan *outstanding* piutang negara (Saldo PNDP s.d. 2017) tercapai sebesar 120,00%

2. SS : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

IKU : Indeks ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan lelang tercapai sebesar 106,41%

IKU : Persentase realisasi pokok lelang tercapai sebesar 120,00%

3. SS : Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien

IKU : Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL tercapai sebesar 120,00%

4. SS : Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif

IKU : Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan tercapai sebesar 102,30%

IKU : Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) tercapai sebesar 118,54%

IKU : Deviasi ketergunaan hasil penilaian tercapai sebesar 120,00%

5. SS : Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

IKU : Persentase efektivitas penyelesaian BKPN tercapai sebesar 100,00%

IKU : Persentase produktivitas lelang tercapai sebesar 87,08%

IKU : Persentase pelaksanaan lelang *e-auction* dan *e-conventional auction* tercapai sebesar 108,28%

IKU : Deviasi data PNDP Fungsional DJKN tercapai sebesar 120,00%

6. SS : Edukasi yang Efektif

IKU : Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi tercapai sebesar 101,83%

7. SS : Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif

IKU : Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara tercapai sebesar 103,49%

8. SS : SDM yang Kompeten

IKU : Persentase pengembangan kompetensi pegawai tercapai sebesar 119,53%

9. SS : Organisasi yang *Fit for Purpose*

IKU : Nilai pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK/WBBM tercapai sebesar 112,42%

IKU : Nilai hasil review pengelolaan kinerja tercapai sebesar 116,32%

IKU : Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator tercapai sebesar 120,00%

10. SS : Pengelolaan Keuangan yang Optimal

IKU : Persentase kualitas pelaksanaan anggaran tercapai sebesar 100,50%

Pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan pada tahun 2021 telah diupayakan secara maksimal. Akan tetapi terdapat 1 (satu) IKU yang tidak dapat mencapai target yaitu persentase produktivitas lelang (status capaian kuning). IKU lainnya berhasil melampaui target yang telah ditetapkan/diatas 100%, sehingga **NKO (Nilai Kinerja Organisasi) KPKNL Surabaya tahun 2021 mencapai 111,59% (status capaian hijau).**

Secara umum pencapaian IKU tahun 2021 sudah sesuai target yang ditetapkan kecuali IKU persentase produktivitas lelang dengan status capaian kuning.

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh KPKNL Surabaya dalam pencapaian target IKU tersebut, adalah sebagai berikut:

- ❖ jumlah frekuensi lelang yang laku oleh Pelelang Muda rendah;
- ❖ beberapa SKPT atas objek lelang tidak terbit.

Tindakan yang telah dilaksanakan untuk mengatasi masalah tersebut adalah:

- ❖ menambah frekuensi lelang pada akhir tahun yang berpotensi laku;
- ❖ menambah jumlah perangkat komputer untuk layanan SKPT online;
- ❖ dalam rangka pencapaian di akhir tahun, difokuskan untuk pelaksanaan lelang ulang dan lelang dengan permohonan baru yang berpotensi guna meningkatkan persentase produktivitas lelang.

Bahwa dalam rangka pencapaian sasaran strategis tahun 2021, KPKNL Surabaya senantiasa berupaya untuk meningkatkan nilai capaian yang telah diperoleh dengan tetap bekerja keras dan menyempurnakan pelaksanaan kebijakan Kantor Pusat yang diarahkan dan ditetapkan. Selanjutnya, di masa yang akan datang diharapkan semua capaian sasaran strategis dapat mencapai hasil yang lebih optimal dan lebih baik dari tahun 2021.

DAFTAR ISI

PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	1
C. Peran Strategis KPKNL Surabaya	7
D. Sistematika Laporan	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. Perencanaan Strategis	11
B. Penetapan Kinerja	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Capaian Kinerja Organisasi	19
Sasaran Strategis 1: Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Optimal	21
Sasaran Strategis 2: Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	25
Sasaran Strategis 3: Birokrasi Dan Layanan Publik Yang Agile, Efektif, Dan Efisien	28
Sasaran Strategis 4: Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif	31
Sasaran Strategis 5: Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	35
Sasaran Strategis 6: Edukasi Yang Efektif	40
Sasaran Strategis 7: Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	43
Sasaran Strategis 8: SDM Yang Kompeten	44
Sasaran Strategis 9: Organisasi Yang Fit For Purpose	46
Sasaran Strategis 10: Pengelolaan Keuangan Yang Optimal	50
B. Realisasi Anggaran	52
C. Capaian Kinerja Lainnya	53
BAB IV PENUTUP	56
LAMPIRAN : Nilai Kinerja Organisasi 2021	
Kontrak Kinerja Tahun 2021	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara jo. PMK Nomor 263/PMK.01/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Surabaya mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.

Setelah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Surabaya mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang.

Dalam menjalankan tugas tersebut, KPKNL Surabaya dituntut untuk melaksanakan dengan akuntabel, efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu wujud dari akuntabilitas tersebut adalah penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN).

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban KPKNL Surabaya dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2021. Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya beralamat di Gedung Keuangan Negara (GKN) Surabaya I Lantai 5, Jalan Indrapura Nomor 5, Surabaya. KPKNL Surabaya merupakan salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal

Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur.

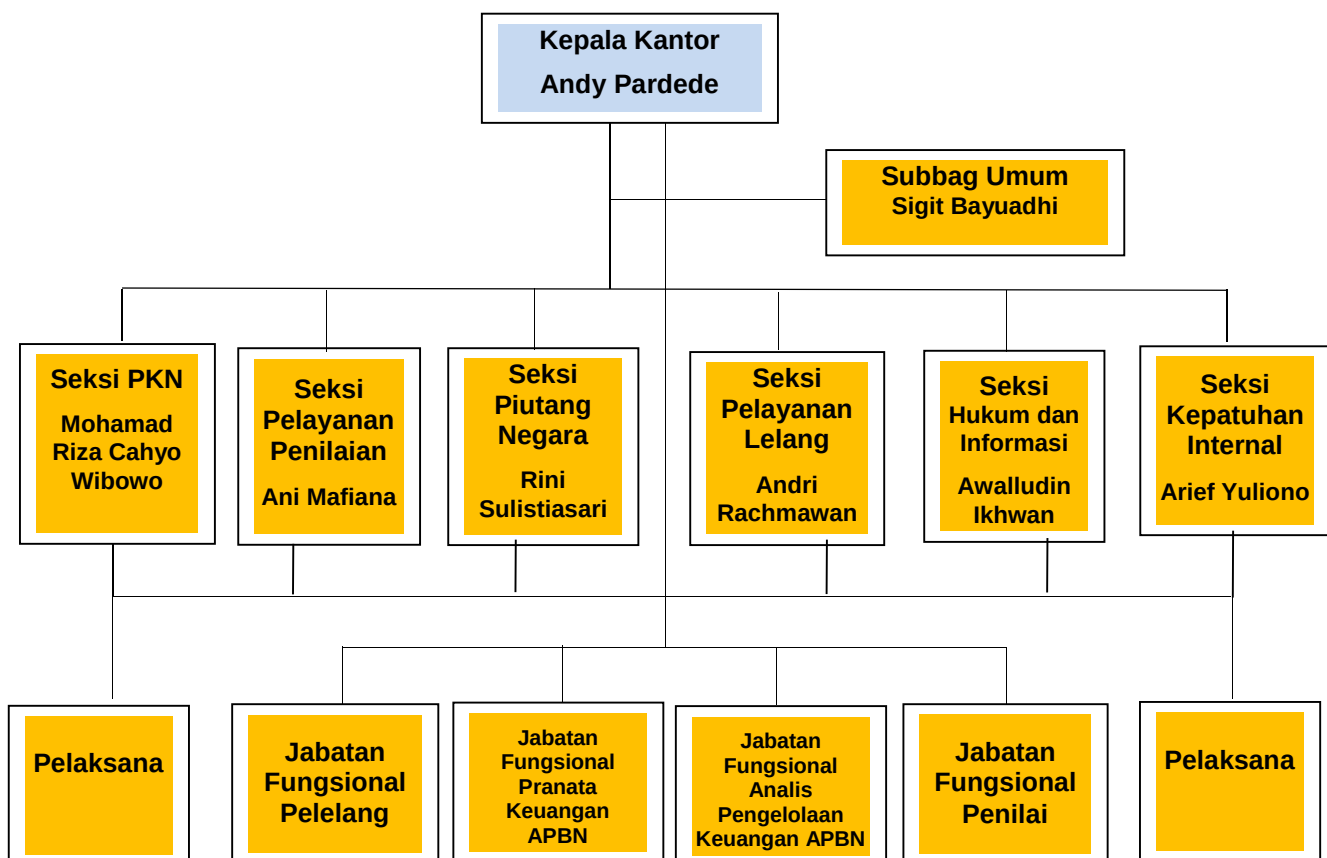
Sebelum ada penataan organisasi sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021, KPKNL Surabaya mempunyai tugas yaitu melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, KPKNL Surabaya dibagi dalam struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Subbagian Umum;
- b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN);
- c. Seksi Pelayanan Lelang;
- d. Seksi Piutang Negara ;
- e. Seksi Pelayanan Penilaian;
- f. Seksi Hukum dan Informasi (HI);
- g. Seksi Kepatuhan Internal (KI); dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi **KPKNL Surabaya** dapat dilihat pada Bagan Organisasi di bawah ini:

Diagram 1.1

Struktur Organisasi KPKNL Surabaya sebelum Penataan Organisasi



Wilayah kerja KPKNL Surabaya dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara jo. PMK Nomor 263/PMK.01/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, meliputi :

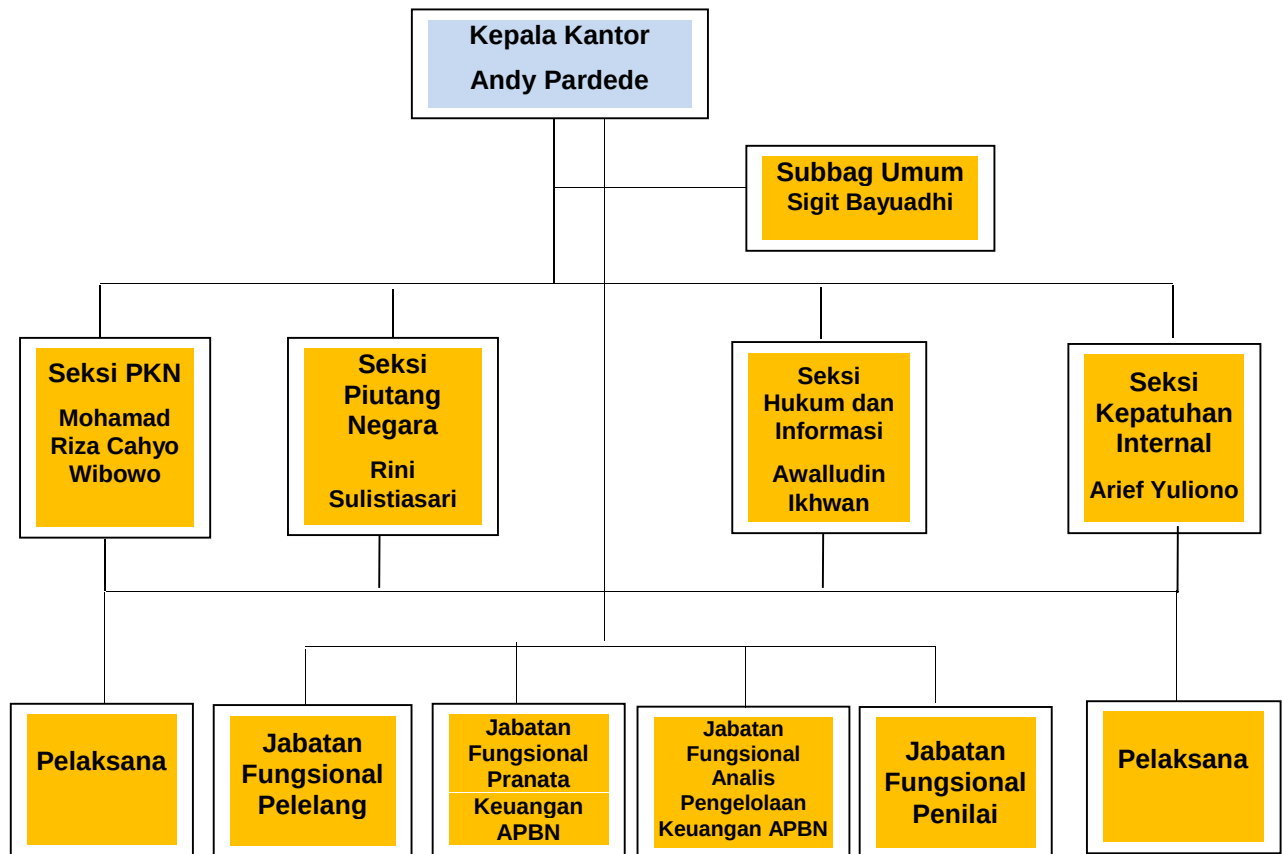
1. Kota Surabaya;
2. Kabupaten Gresik;
3. Kabupaten Bojonegoro;
4. Kabupaten Lamongan;
5. Kabupaten Tuban; dan
6. Kabupaten Nganjuk.

Pasca penataan organisasi sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021, KPKNL Surabaya mempunyai tugas yaitu melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, KPKNL Surabaya dibagi dalam struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Subbagian Umum;
- b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN);
- c. Seksi Piutang Negara ;
- d. Seksi Hukum dan Informasi (HI);
- e. Seksi Kepatuhan Internal (KI); dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi **KPKNL Surabaya** pasca penataan organisasi dapat dilihat pada Bagan Organisasi di bawah ini:

Diagram 1.2
Struktur Organisasi KPKNL Surabaya Pasca Penataan Organisasi



Wilayah kerja KPKNL Surabaya dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, meliputi :

1. Kota Surabaya;
2. Kabupaten Gresik;
3. Kabupaten Lamongan; dan
4. Kabupaten Tuban.

Dalam menjalankan tugasnya, KPKNL Surabaya didukung oleh 44 orang pegawai yang terbagi atas 6 pejabat struktural, 7 pejabat fungsional pelelang, 6 pejabat fungsional penilai, 2 pejabat fungsional pranata keuangan, dan 23 pelaksana. Komposisi pegawai KPKNL Surabaya berdasarkan tingkat pendidikan, golongan, dan tugas fungsional adalah sebagai berikut:

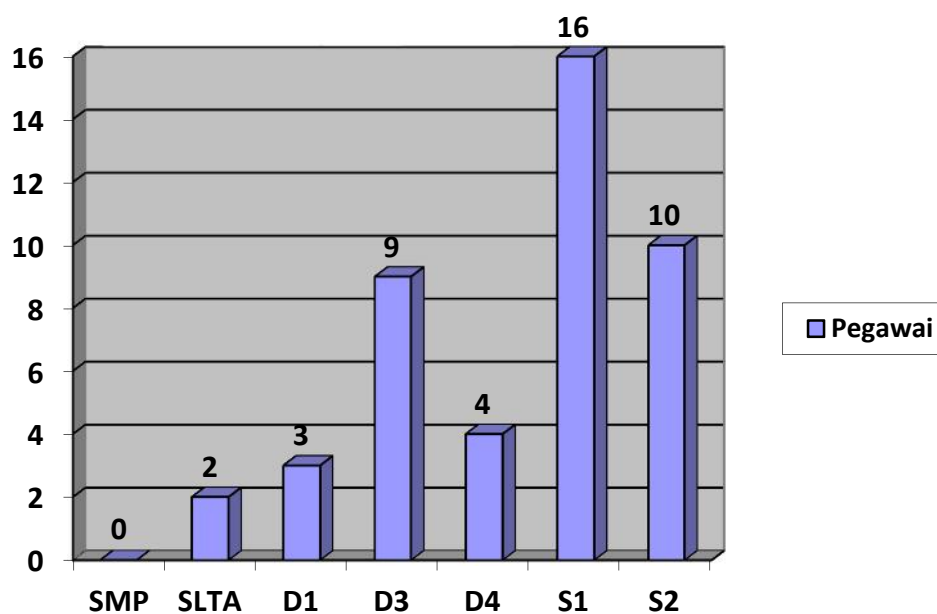
Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

KPKNL	Tingkat Pendidikan							
	S2	S1	D4	D3	DI	SLTA	SLTP	SD
Surabaya	10	16	4	9	3	2	-	-
JUMLAH	10	16	4	9	3	2	-	-

Sumber: Data Simpeg per 31 Desember 2021

Komposisi pegawai berdasarkan pendidikan adalah sebagai berikut:

Grafik 1.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan



Komposisi pegawai berdasarkan golongan secara tabel adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

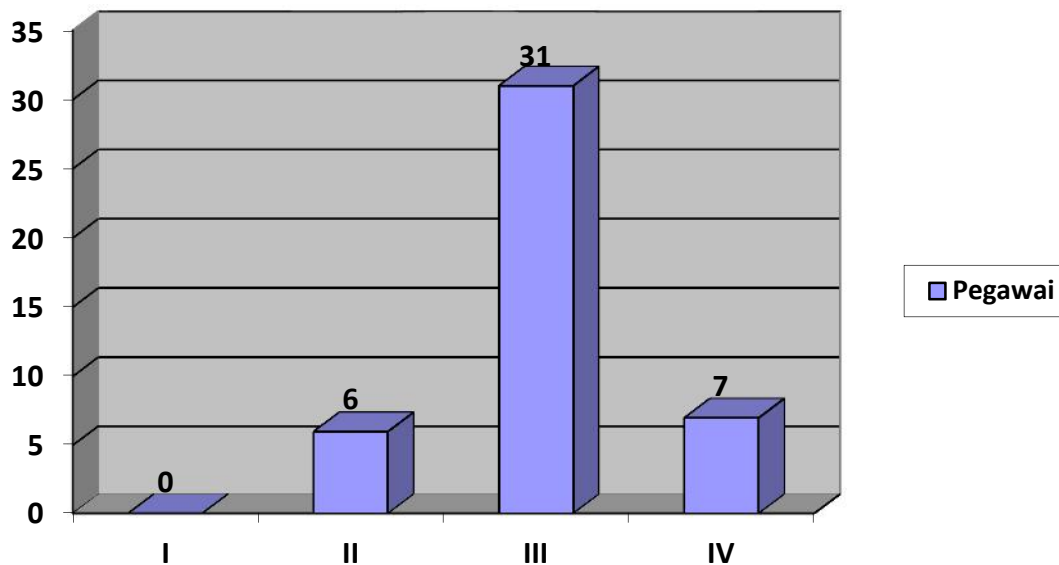
KPKNL	Rincian Per Golongan				JUMLAH
	IV	III	II	I	
Surabaya	7	31	6	-	44
JUMLAH	7	31	6	-	44

Sumber: Data Simpeg per 31 Desember 2021

Komposisi pegawai berdasarkan golongan secara grafik dapat tersaji sebagai berikut:

Grafik 1.2

Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan



Komposisi pegawai berdasarkan tugas fungsional secara tabel dapat tersaji sebagai berikut:

Tabel 1.3

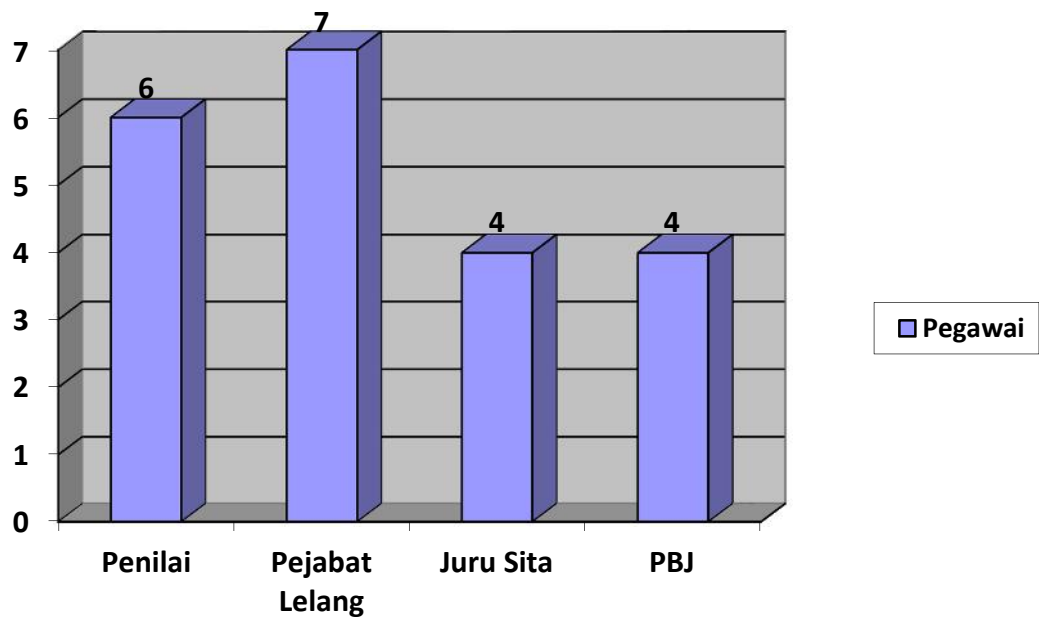
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tugas Fungsional

KPKNL	Rincian Tugas Fungsional				
	Penilai	Pelelang	Juru sita	PBJ	JUMLAH
Surabaya	6	7	4	4	21

Sumber: Data Simpeg per 31 Desember 2021

Komposisi pegawai berdasarkan tugas fungsional secara grafik sebagai berikut:

Grafik 1.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tugas Fungsional



C. Peran Strategis KPKNL Surabaya

Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang, KPKNL Surabaya memiliki peran strategis sebagai berikut :

a. Melakukan Pengelolaan Kekayaan Negara

Sebagai Pengelola Barang Milik Negara, KPKNL Surabaya memiliki peran strategis dalam pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan antara lain:

1. optimalisasi penerimaan (*revenue center*), efisiensi pengeluaran dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara terutama dalam utilisasi kekayaan negara;
2. optimalisasi pendayagunaan aset-aset yang terindikasi *idle* dan pengamanan kekayaan negara baik secara fisik, administrasi dan hukum; dan
3. berperan penting terhadap upaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penatausahaan dan pengelolaan barang milik negara.

Dalam setiap tahapan pengelolaan Barang Milik Negara, dimulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, KPKNL Surabaya senantiasa menekankan pada pentingnya membangun kerja sama yang lebih baik antara Pengelola Barang dengan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara.

Membangun dan meningkatkan kemampuan (*capacity building*) dalam pengelolaan Barang Milik Negara pada tataran Kuasa Pengguna Barang akan sangat

berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan Barang Milik Negara sehingga sinergi antara Pengelola Barang dan Kuasa Pengguna Barang menjadi sangat penting dan senantiasa ditingkatkan oleh KPKNL Surabaya dalam rangka pengelolaan kekayaan negara yang transparan dan akuntabel, meningkatkan penerimaan negara bukan pajak dalam pengelolaan barang milik negara, serta penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang baik dan benar.

b. Optimalisasi Penataan Aset menuju *Revenue Center*

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) menjadi alternatif dalam menyokong APBN selain penerimaan dari sektor perpajakan. Melalui pengelolaan BMN *Idle* yang baik dan berdaya guna, KPKNL Surabaya sebagai pengelola dapat mengoptimalkan penggunaan/pemanfaatan aset *idle* sehingga paradigma *cost center* tidak dominan dan dapat bergeser ke arah *revenue center*.

c. Memberikan Pelayanan Pengurusan Piutang Negara

Peran strategis KPKNL Surabaya bidang pengurusan piutang negara dalam rangka menyelamatkan keuangan Negara menjadi berkurang, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/PUU-IX/2011 tanggal 10 Oktober 2011 dan ditindaklanjuti dengan PMK nomor 168/PMK.06/2013 tanggal 25 Nopember 2013 tentang Tata Cara Pengembalian Pengurusan Piutang Yang Berasal dari Penyerahan BUMN/BUMD dan Badan Usaha Yang Modalnya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh BUMN/BUMD.

Pengurusan Piutang Negara pada sekarang ini difokuskan pada pengelolaan piutang macet yang berasal dari Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah dan Non Kementerian/Lembaga saja.

d. Memberikan Pelayanan Lelang

Pelayanan lelang bertujuan untuk menyediakan sarana transaksi penjualan aset secara umum. Dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL Surabaya secara terus-menerus mengupayakan penggalan potensi lelang baik lelang eksekusi maupun non eksekusi, sehingga lelang dapat dijadikan sebagai salah satu sarana jual beli yang diminati oleh masyarakat (*sales mean auction*).

Dalam pelaksanaan lelang terdapat beberapa keuntungan dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu lebih transparan, akuntabel, kompetitif, efisien, dan lebih menjamin kepastian hukum dengan adanya risalah lelang yang merupakan akta otentik/dokumen negara.

Risalah Lelang berfungsi sebagai *akta van transport* untuk kepentingan peralihan hak. KPKNL Surabaya diharapkan menjadi akselerator agar lelang lebih diminati masyarakat seperti pelaksanaan jual beli biasa dan dapat berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat khususnya di wilayah kerjanya.

Tuntutan pelaksanaan lelang yang lebih transparan dan akuntabel telah dijawab dengan inovasi pelaksanaan lelang secara elektronik (*e-auction*). Diharapkan pelaksanaan lelang adaptif dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga dapat dikenal oleh masyarakat luas.

e. Memberikan Kontribusi Pemasukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ke Kas Negara

Dalam memberikan pelayanan pengurusan piutang negara, KPKNL Surabaya memperoleh hasil berupa biaya administrasi (biad) Pengurusan Piutang Negara.

Sedangkan dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL Surabaya memperoleh hasil bea lelang (bea lelang pembeli dan/atau bea lelang penjual) dan PNBP lelang lainnya termasuk bea lelang pegadaian yang selanjutnya disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Selain itu, secara tidak langsung, dalam pengelolaan kekayaan negara, KPKNL Surabaya juga memberikan kontribusi yang cukup besar dalam hal pemberian persetujuan pemanfaatan aset (sewa) dan persetujuan pemindahtanganan/penjualan barang milik negara.

D. Sistematika Laporan

Laporan Kinerja **KPKNL Surabaya** Tahun 2021 menggunakan Sistematika Laporan sebagai berikut:

1. Ikhtisar Eksekutif

Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, langkah-langkah antisipatif yang diambil.

2. Bab I Pendahuluan

Bagian ini menguraikan penjelasan umum organisasi yang terdiri dari tugas, fungsi, dan struktur organisasi dan peran strategis instansi KPKNL Surabaya serta sistematika laporan.

3. Bab II Perencanaan Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan penetapan kinerja.

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang sasaran kinerja, capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran KPKNL Surabaya tahun 2021.

5. Bab IV Penutup

Bagian ini menguraikan tentang simpulan umum atas capaian organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, KPKNL Surabaya selama Tahun 2021 telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang diuraikan laporan ini. Dengan disusunnya Laporan Kinerja KPKNL Surabaya Tahun 2021 diharapkan dapat menjadi bahan monitoring dan evaluasi dan untuk meningkatkan kinerja KPKNL Surabaya di tahun yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi ini. Berbagai teknik analisis dapat digunakan dalam proses ini, termasuk analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*), PEST (*Political, Economic, Social, Technological*), atau STEER (*Socio-cultural, Technological, Economic, Ecological, Regulatory*).

Perencanaan Strategis DJKN disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yaitu Kementerian/Lembaga yang memiliki instansi vertikal di daerah menetapkan entitas selaku koordinator penyusunan Laporan Kinerja satuan kerja di wilayah yang bersangkutan.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis DJKN yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024. Rencana Strategis DJKN memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

Agar tetap eksis dan konsisten serta mempunyai arah yang jelas dalam menentukan langkah-langkah atau kebijakan-kebijakan yang diambil dalam menjalankan tugas-tugas pokok, KPKNL Surabaya tetap mengacu pada visi yang telah ditetapkan yaitu ***“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”***

Sebagai wujud penjabaran dari visi yang telah ditetapkan, KPKNL Surabaya memiliki 5 (lima) misi yang harus diemban dan dilaksanakan, yaitu :

1. mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategik organisasi sesuai tugas dan fungsi maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh KPKNL Surabaya merujuk pada tujuan yang hendak dicapai oleh DJKN untuk periode tahun 2020-2024 antara lain:

- a. peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara;
- b. optimalisasi pengurusan piutang negara;
- c. peningkatan pelayanan lelang serta;
- d. menjaga kesinambungan reformasi birokrasi, *good governance*, dan penguatan kelembagaan.

Dalam mencapai tujuan tersebut, KPKNL Surabaya telah menentukan sasaran strategis yang ingin dicapai. Sasaran merupakan penjabaran tujuan yang terukur dan telah ditetapkan secara spesifik serta dapat dicapai dalam jangka waktu satu tahun. Sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara, yaitu: pengelolaan kekayaan Negara yang optimal, pengamanan kekayaan negara yang akuntabel serta monitoring dan evaluasi yang efektif.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan optimalisasi pengurusan piutang negara, yaitu pengurusan piutang negara yang optimal dan peningkatan PNBPN dari pengurusan piutang negara.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan pelayanan lelang, yaitu pelayanan lelang yang optimal, peningkatan PNBPN dari pelayanan lelang dan pemanfaatan TIK yang optimal.
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai tujuan kesinambungan reformasi birokrasi, *good governance*, dan penguatan kelembagaan, yaitu SDM yang kompetitif, kepuasan pengguna layanan yang tinggi, pelayanan yang berkualitas, peningkatan edukasi masyarakat dan pelaku ekonomi serta monitoring dan evaluasi yang efektif.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut di atas, maka diperlukan strategi yang harus ditempuh oleh KPKNL Surabaya. Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan organisasi.

Strategi KPKNL Surabaya dalam upaya mewujudkan tujuan yang hendak dicapai antara lain:

1. Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara;
2. Penyelesaian piutang negara yang mempunyai nilai *outstanding* besar atau *high profile*;

3. Optimalisasi tahapan pengurusan piutang negara;
4. Penyelesaian aset properti BMN yang belum dilengkapi dengan dokumen peralihan;
5. Verifikasi fisik aset properti BMN dan pengurusan kelengkapan dokumen;
6. Standarisasi pelayanan penilaian pada instansi vertikal;
7. Pengembangan pedoman pengawasan dan pembinaan penilai pemerintah;
8. Penjaminan kualitas dan pengembangan profesional berkelanjutan Penilai Pemerintah;
9. Pengembangan riset data dan informasi penilaian;
10. Pelayanan lelang yang optimal;
11. Peningkatan PNBP dari pelayanan lelang, piutang dan pengelolaan aset BMN;
12. Modernisasi lelang melalui *e-auction*;
13. Penguatan jabatan fungsional pelelang;
14. Penggalan potensi lelang untuk seluruh jenis lelang;
15. Melakukan restrukturisasi/penataan dan penajaman tugas dan fungsi unit kerja;
16. Mengoptimalkan fungsi pengembangan pegawai;
17. Penyusunan Arsitektur TIK yang komprehensif;
18. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai *core business*;
19. Peningkatan efektifitas tata kelola, pengendalian intern, pengelolaan kinerja, dan manajemen risiko;
20. Optimalisasi fungsi unit kepatuhan internal;
21. Peningkatan efektifitas layanan kehumasan..

Penjabaran secara detil dari strategi yang akan dijalankan, diwujudkan dalam bentuk program kerja/kegiatan. dari program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

KPKNL Surabaya melaksanakan “Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Pemberian Pelayanan Penilaian, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang”.

Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan program (*outcome*), yaitu:

1. Terselenggaranya Pengelolaan Kekayaan Negara
2. Terwujudnya Pelayanan Penilaian yang akuntabel
3. Tercapainya Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara, dan
4. Pelayanan lelang yang profesional, tertib, transparan dan akuntabel serta mampu membangun citra baik bagi *stakeholder*.

Untuk mencapai program tersebut telah ditetapkan, beberapa Indikator Kinerja kegiatan yaitu:

1. Nilai kekayaan negara yang diutilisasi

2. Jumlah penerimaan negara dari biaya administrasi (biad) pengurusan piutang Negara
3. Jumlah penerimaan negara dari bea lelang
4. Jumlah piutang negara yang dapat diselesaikan (PNDS)
5. Jumlah penerimaan dari pokok lelang,.

B. Penetapan/Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Penetapan kinerja yang telah ditargetkan merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun. Gambaran penetapan kinerja KPKNL Surabaya Tahun 2021 dijabarkan dalam 10 Sasaran Strategis (SS) yang dicapai melalui penetapan 20 target Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

1. SS : Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal

IKU : Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK tercapai sebesar 120,00%

IKU : Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang tercapai sebesar 104,18%

IKU : Persentase penurunan *outstanding* piutang negara (Saldo PNDS s.d. 2017) tercapai sebesar 120,00%

2. SS : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

IKU : Indeks ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan lelang tercapai sebesar 106,41%

IKU : Persentase realisasi pokok lelang tercapai sebesar 120,00%

3. SS : Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien

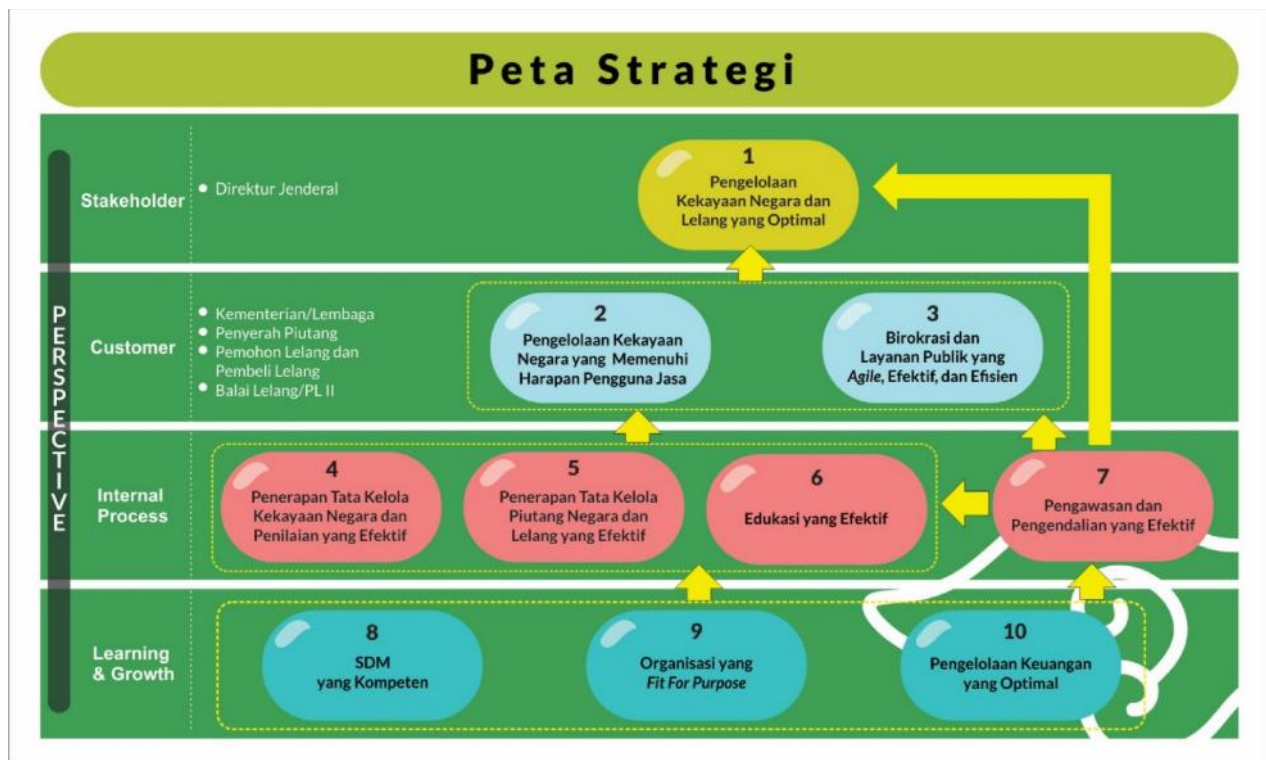
IKU : Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL tercapai sebesar 120,00%

4. SS : Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif

IKU : Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan tercapai sebesar 102,30%

- IKU : Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) tercapai sebesar 118,54%
- IKU : Deviasi ketergunaan hasil penilaian tercapai sebesar 120,00%
- 5. SS : Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif**
- IKU : Persentase efektivitas penyelesaian BKPN tercapai sebesar 100,00%
- IKU : Persentase produktivitas lelang tercapai sebesar 87,08%
- IKU : Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction tercapai sebesar 108,28%
- IKU : Deviasi data PNBP Fungsional DJKN tercapai sebesar 120,00%
- 6. SS : Edukasi yang efektif**
- IKU : Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi tercapai sebesar 101,83%
- 7. SS : Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif**
- IKU : Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara tercapai sebesar 103,49%
- 8. SS : SDM yang kompeten**
- IKU : Persentase pengembangan kompetensi pegawai tercapai sebesar 119,53%
- 9. SS : Organisasi yang *fit for purpose***
- IKU : Nilai pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK/WBBM tercapai sebesar 112,42%
- IKU : Nilai hasil review pengelolaan kinerja tercapai sebesar 116,32%
- IKU : Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator tercapai sebesar 120,00%
- 10. SS : Pengelolaan Keuangan yang Optimal**
- IKU : Persentase kualitas pelaksanaan anggaran tercapai sebesar 100,50%

**PETA STRATEGI PETA STRATEGI KPKNL SURABAYA
TAHUN 2021**



Peta strategi KPKNL Surabaya mempunyai 4 perspektif, yaitu: *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Dari peta strategi KPKNL Surabaya Tahun 2021 tersebut terdapat 10 (sepuluh) Sasaran Strategis (SS) dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Adapun keterkaitan antara Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama dapat dilihat dalam tabel berikut.

**NILAI KINERJA ORGANISASI
KPKNL SURABAYA
TAHUN 2021**

Kode	IKU	Tingkat Kendali	Target Tahun 2021	Keterangan
<i>Stakeholder (25%)</i>				
1	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal			
1a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK	P/L	62%	
1b-CP	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	P/M	100%	
1c-CP	Persentase penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2017)	P/M	100%	

Kode	IKU	Tingkat Kendali	Target Tahun 2021	Keterangan
<i>Customer Perspective (15%)</i>				
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa			
2a-CP	Indeks ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan lelang	P/H	87	
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	P/M	100%	
3	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien			
3a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	E/M	5%	
<i>Internal Process Perspective (30%)</i>				
4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif			
4a-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	P/L	100%	
4b-CP	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/H	100%	
4c-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	22%	
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif			
5a-CP	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	P/M	100%	
5b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	35%	
5c-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	P/M	92%	
5d-CP	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	P/M	12,50%	
6	Edukasi yang efektif			
6a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	P/M	96	
7	Pengawasan dan pengendalian yang efektif			
7a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	P/M	85%	
<i>Learning & Growth Perspective (30%)</i>				
8	SDM Yang Kompeten			
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	100%	
9	Organisasi yang fit for purpose			

Kode	IKU	Tingkat Kendali	Target Tahun 2021	Keterangan
9a-N	Nilai pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK/WBBM	P/M	85	
9b-N	Nilai hasil review pengelolaan kinerja	P/M	75	
9c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	P/M	80	
10	Pengelolaan Keuangan yang Optimal			
10a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	95,5%	

PENGUKURAN KINERJA

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja tahun 2021, KPKNL Surabaya berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/MK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengukuran capaian kinerja utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%
2. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi maximize semua agar sebanding dengan yang lainnya
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU
4. IKU yang ditetapkan, diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target
5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120%;
 - b. Apabila realisasi pencapaiannya tidak sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran capaian kinerja KPKNL Surabaya Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja, diperoleh hasil akhir capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Surabaya Tahun 2021 sebesar **111,59% (seratus sebelas koma lima puluh sembilan persen)**.

Sebagaimana diketahui, pada Tahun 2021 KPKNL Surabaya telah menetapkan 10 Sasaran Strategis (SS) dan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara teknis dilakukan pengukuran capaian kinerja, evaluasi kinerja dan analisis kinerja yang diuraikan dibawah ini.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Hasil pencapaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada KPKNL Surabaya tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1
NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO) TAHUN 2021
KPKNL SURABAYA

Kode	IKU	Tingkat Kendali	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
	<i>Stakeholder Perspective (25%)</i>					28,82%	
1	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal					115,29%	
1a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK	P/L	62%	78,31%	126,310%	120,00%	hijau
1b-CP	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	P/M	100%	104,18%	104,181%	104,18%	hijau
1c-CP	Persentase penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2017)	P/M	100%	164%	163,85%	120,00%	hijau
	<i>Customer Perspective (15%)</i>					17,55%	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa					114,02%	
2a-CP	Indeks ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan lelang	P/H	87	92,58	106,41%	106,41%	hijau
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	P/M	100%	129,22%	129,22%	120,00%	hijau

3	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien					120,00%	
3a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	E/M	4,6	4,90	10652,17%	120,00%	hijau
	<i>Internal Process Perspective (30%)</i>					31,59%	
4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif					111,99%	
4a-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan	P/L	100%	102,30%	102,30%	102,30%	hijau
4b-CP	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/H	100%	118,54%	118,54%	118,54%	hijau
4c-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	22%	7,06%	167,91%	120,00%	hijau
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif					103,84%	
5a-CP	Persentase efektivitas penyelesaian BKN	P/M	100%	100,00%	100,00%	100,00%	hijau
5b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	35,00%	30,48%	87,08%	87,08%	kuning
5c-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	P/M	92,00%	99,62%	108,28%	108,28%	hijau
5d-CP	Deviasi data PNBPN fungsional DJKN	P/M	12,50%	0,25%	198,00%	120,00%	hijau
6	Edukasi yang Efektif					101,83%	
6a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	P/M	96	97,76	101,83%	101,83%	hijau
7	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif					103,49%	
7a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	P/M	85%	87,97%	103,49%	103,49%	hijau
	<i>Learning & Growth Perspective (30%)</i>					33,63%	
8	SDM yang Kompeten					119,53%	
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	100%	119,53%	119,53%	119,53%	hijau
9	Organisasi yang Fit for Purpose					116,25%	
9a-N	Nilai pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK/WBBM	P/M	85	95,56	112,42%	112,42%	hijau
9b-N	Nilai hasil review pengelolaan kinerja	P/M	75	87,24	116,32%	116,32%	hijau
9c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	P/M	80	97,67	122,08%	120,00%	hijau
10	Pengelolaan Keuangan yang Optimal					100,50%	
10a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	95,5%	95,98%	100,50%	100,50%	hijau
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)						111,59%	hijau

Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian setiap Sasaran Strategis (SS) yang terinci dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan capaian IKU dan kegagalan capaian IKU dengan cara membandingkan antara target yang ditetapkan dengan realisasi yang berhasil dicapai.

Adapun hasil analisis terhadap pencapaian setiap Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut di bawah ini.

1. Sasaran Strategis 1: Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Optimal

Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas BMN, KNL dan KND; pengurusan piutang negara; dan pelayanan lelang.

Pengelolaan Kekayaan Negara yang dilaksanakan oleh KPKNL Surabaya meliputi pengelolaan barang milik negara, pengelolaan kekayaan negara lain-lain, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang. Pengelolaan Negara dikatakan optimal apabila *“aset tetap terutilisasi sepenuhnya (zero idle), adanya nilai tambah BMN berupa penghematan biaya (cost saving) dan PNBP (revenue generating), tingginya turn over penggunaan BMN persediaan (saldo persediaan pada laporan keuangan dalam rentang minimum), dan adanya manfaat ekonomi (selain cost saving dan revenue), sosial, dan lingkungan atas pengelolaan aset. Misal diukur dengan monetisasi dampak pembangunan aset bagi masyarakat”*.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Surabaya mengidentifikasi 3 (tiga) IKU, yaitu *Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK, Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (PNBP) dan Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara (Saldo PNDS s.d. 2017)* yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.2

Capaian IKU Pada Sasaran Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Optimal

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	62%	78,31%	120,00%
2. Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)	100%	104,18%	104,18%
3. Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara (Saldo PNDS s.d. 2017)	100%	164,00%	120,00%

a. IKU Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK (1a-CP)

Objek dari IKU Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK adalah Tanah dan/atau Bangunan/Gedung Kantor dan Tanah dan/atau Rumah Negara/Mess/Asrama/Sejenisnya pada Satker Kementerian/Lembaga untuk wilayah KPKNL Surabaya. Target IKU ini tahun 2021 adalah 62%, telah tercapai 78,31%.

Rincian realisasi Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK dapat dilihat selengkapnya dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3.3

Realisasi Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

KPKNL Surabaya	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
	1a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	Sd Q3	Q4	Y-21	Pol/KP
Target	-	50%	50%	55%	55%	62%	62%	Max/
Realisasi		93,51%	93,51%	115%	115%	78,31%	78,31%	TLK
Capaian		93,51%	120%	120%	120%	120%	120%	

KPKNL Surabaya dalam mencapai IKU Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK mengalami kendala, yaitu terdapat beberapa Satker yang belum memahami cara pengisian form.

Dalam mengatasi kendala tersebut, KPKNL Surabaya melakukan koordinasi langsung dengan Satker dalam memberikan bimbingan dan petunjuk atas penerapan dari kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK. Tindakan yang dilakukan KPKNL Surabaya adalah dengan mengirimkan surat kepada Satker untuk menyampaikan data SBSK pada unitnya.

b. IKU Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (1b-CP)

Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang berasal dari :

- 1). PNBPN BMN

Nilai Penerimaan Negara Yang Bersumber Dari BMN adalah PNBPN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diluar penerimaan perpajakan yang bersumber dari barang milik negara.

2). PNBPN Piutang Negara (PNBPN PN)

Nilai pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL.

3). PNBPN Lelang

Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh Kanwil dan KPKNL berupa:

- bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh Pegadaian
- bea lelang batal atas permintaan penjual,
- biaya permohonan lelang,
- uang jaminan pembeli wanprestasi,
- penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang.

Target PNBPN tahun 2021 pada KPKNL Surabaya sebesar Rp92.055.000.000, terdiri dari PNBPN Aset sebesar Rp36.440.000.000; PNBPN PN sebesar Rp120.000.000; dan PNBPN Lelang sebesar Rp55.495.000.000. Capaian tahun 2021 sebesar 104,42% sejumlah Rp96.121.028.106, yang berasal dari:

- Realisasi PNBPN Aset : Rp96.121.028.106,- (126,77%)
- Realisasi PNBPN PN : Rp46.195.095.835,- (162,60%)
- Realisasi PNBPN Lelang : Rp49.730.802.823,- (89,61%)

Tabel 3.4

Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

KPKNL Surabaya	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal							
	1b-CP Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	Sd Q3	Q4	Y-21	Pol/KP
Target	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	19,25%	32,48%	32,48%	52,37%	52,37%	104,42%	104,42%	
Capaian	120,00%	108,28%	108,28%	87,28%	87,28%	104,42%	104,42%	

Adanya pandemi covid-19 menyebabkan adanya pembatasan-pembatasan, baik itu untuk survei lapangan maupun memasuki suatu wilayah/zona dengan kategori merah dengan adanya pandemi ini juga menyebabkan daya beli dari masyarakat juga menurun.

Secara total, capaian IKU Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang telah tercapai melebihi target yang ditetapkan dengan status hijau. Hanya capaian PNBPN Lelang dengan status kuning. Kendala capaian PNBPN Lelang diantaranya adalah hingga akhir bulan

Desember 2021 frekuensi pokok lelang tidak laku mencapai 69% dari jumlah total lot lelang yang disebabkan karena nilai limit lelang masih jauh di atas harga pasar, sehingga mengurangi minat pembeli dan adanya pembatalan lelang yang karena adanya penyelesaian di luar lelang dan karena SKPT tidak terbit.

Tindakan yang telah dilakukan KPKNL Surabaya dalam pencapaian IKU tersebut adalah:

- Untuk PNBPN Aset, dengan memberikan persetujuan perubahan nilai sewa melalui surat persetujuan nomor S-280/MK.6/WKN.10/KNL.01/2021 tanggal 24 November 2021, S-282/MK.6/WKN.10/KNL.01/2021 tanggal 30 November 2021, S-286/MK.6/WKN.10/KNL.01/2021 tanggal 6 Desember 2021, S-289/MK.6/WKN.10/KNL.01/2021 tanggal 8 Desember 2021, S-290/MK.6/WKN.10/KNL.01/2021 tanggal 9 Desember 2021, S-306/MK.6/WKN.10/KNL.01/2021 tanggal 30 Desember 2021.
- Untuk PNBPN PN, dengan melakukan penyampaian Surat Paksa dan penagihan secara langsung kepada penanggung hutang.
- Untuk PNBPN Lelang, dengan mempercepat pelayanan permohonan lelang melalui aplikasi permohonan lelang *online*, berpartisipasi secara aktif memasarkan objek lelang, mempercepat proses lelang ulang terutama yang nilai limitnya telah diturunkan, dan menambah jumlah perangkat komputer untuk layanan SKPT online.

c. IKU Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara (Saldo PNDS s.d. 2017) (1c-CP)

IKU Tingkat Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengelolaan piutang negara dari penagihan piutang negara. Penurunan Outstanding Piutang Negara diperoleh dari penurunan outstanding piutang negara yang SP3N-nya dibuat hingga 31 Desember 2017. Data tersebut diperoleh dari Aplikasi FocusPN.

Target PNDS (Penurunan outstanding per 31 Desember 2016 sebesar 3% dari dari outstanding Rp316.673.650.056,26 yaitu sebesar Rp6.296.576.263). Capaian tahun 2021 sebesar 163,85% yaitu Rp10.317.169.136.

Tabel 3.5

Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara (saldo PNDS s.d. 2017)

KPKNL Surabaya	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal							
	1c-CP Persentase penurunan outstanding piutang negara (saldo PNDS s.d. 2017)							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	Sd Q3	Q4	Y-21	Pol/KP
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	3%	Max/ TLK
Realisasi	18,73%	84,11%	84,11%	93,4%	93,4%	164%	164%	
Capaian	4,49%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Tindakan yang telah dilakukan KPKNL Surabaya dalam pencapaian IKU ini adalah dengan menyampaikan surat paksa dan penagihan secara langsung kepada penanggung hutang, serta melakukan pengembalian BKNP penyerahan BPJS Ketenagakerjaan.

2. Sasaran Strategis 2: Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Surabaya mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yaitu *Indeks Ketepatan Waktu Layanan Kekayaan Negara dan Lelang* dan *Persentase Realisasi Pokok Lelang* yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.6

Capaian IKU Pada Sasaran Pengelolaan kekayaan Negara Yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Kinerja
1.	Indeks Ketepatan Waktu Layanan Kekayaan Negara dan Lelang	87	92,58	106,41%
2.	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	129,22%	120%

a. IKU Indeks Ketepatan Waktu Layanan Kekayaan Negara dan Lelang (2a-CP)

IKU ini untuk mengukur ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara dengan tujuan menjaga dan meningkatkan kualitas layanan. Terdapat 14 (empat belas) layanan kekayaan negara yang diukur pada indikator ini, meliputi Persetujuan/Penolakan Permohonan Sewa BMN Berupa Tanah dan/atau Bangunan (Integrasi Layanan) pada KPKNL, Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan pada KPKNL, Persetujuan/Penolakan Penjualan BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan pada KPKNL, Penetapan Jadwal Lelang, Pelayanan Pengembalian Uang Jaminan Penawaran Lelang, Pelayanan Pemberian Kuitansi Pembayaran Harga Lelang, Pelayanan Pemberian Kutipan Risalah Lelang dan Dokumen Kepemilikan Barang, Penyetoran Hasil Bersih Lelang (Kas Negara), Penyetoran Hasil Bersih Lelang (selain Kas Negara), Pelayanan Permohonan Keringanan Utang pada KPKNL, Pelayanan Permohonan Penarikan Pengurusan Piutang Negara, Pelayanan Permohonan Penebusan Barang Jaminan Senilai/di Atas Nilai Pengikatan, Penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas, dan Penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Selesai.

Layanan unggulan yang dinilai tersebut berada pada Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN), Seksi Piutang Negara (PN), Seksi Pelayanan Lelang (PL), dan Seksi Hukum dan Informasi (HI).

Rata-rata indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara KPKNL Surabaya tahun 2021 sebesar 92,58 atau terealisasi sebesar 106,41% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 87. Adapun capaian per jenis layanan dapat ditabulasikan di bawah ini.

Tabel 3.7

Capaian Indeks Ketepatan Waktu Layanan Kekayaan Negara dan Lelang

No	Jenis Layanan	Capaian
1	Persetujuan/Penolakan Permohonan Sewa BMN Berupa Tanah dan/atau Bangunan (Integrasi Layanan) pada KPKNL	83,91
2	Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan pada KPKNL	96,52
3	Persetujuan/Penolakan Penjualan BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan pada KPKNL	91,67
4	Penetapan Jadwal Lelang	100,00
5	Pelayanan Pengembalian Uang Jaminan Penawaran Lelang	100,00
6	Pelayanan Pemberian Kuitansi Pembayaran Harga Lelang	100,00
7	Pelayanan Pemberian Kutipan Risalah Lelang dan Dokumen Kepemilikan Barang	100,00
8	Penyetoran Hasil Bersih Lelang (Kas Negara)	100,00
9	Penyetoran Hasil Bersih Lelang (selain Kas Negara)	92,31
10	Pelayanan Permohonan Keringanan Utang pada KPKNL	100,00
11	Pelayanan Permohonan Penarikan Pengurusan Piutang Negara	NIHIL
12	Pelayanan Permohonan Penebusan Barang Jaminan Senilai/di Atas Nilai Pengikatan	NIHIL
13	Penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas	100,00
14	Penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Selesai	NIHIL
Rata-Rata Nilai Capaian		92,58

Permasalahan yang sering ditemui dalam pencapaian IKU ini adalah kurang lengkapnya dokumen penyedia informasi dan SOP melewati norma waktu yang telah ditentukan. Tindakan yang telah dilaksanakan oleh KPKNL Surabaya dalam pencapaian IKU ini adalah dengan melakukan pemantauan secara berkala kepada seksi teknis agar dalam melakukan pelayanan sesuai aturan, lengkap, dan tepat waktu.

b. IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang (2b-CP)

Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I, dan Pegadaian dalam periode tertentu.

Target jumlah pokok lelang pada KPKNL Surabaya tahun 2021 adalah sebesar Rp1.077.000.000.000. Dan realisasi tahun 2021 sebesar Rp1.391.692.230.408 atau 129,22% dengan rincian pokok lelang PL I Rp1.072.696.603.708 dan pokok lelang pegadaian Rp318.995.626.700 dengan capaian 120%.

Tabel 3.8.

Persentase Realisasi Pokok Lelang

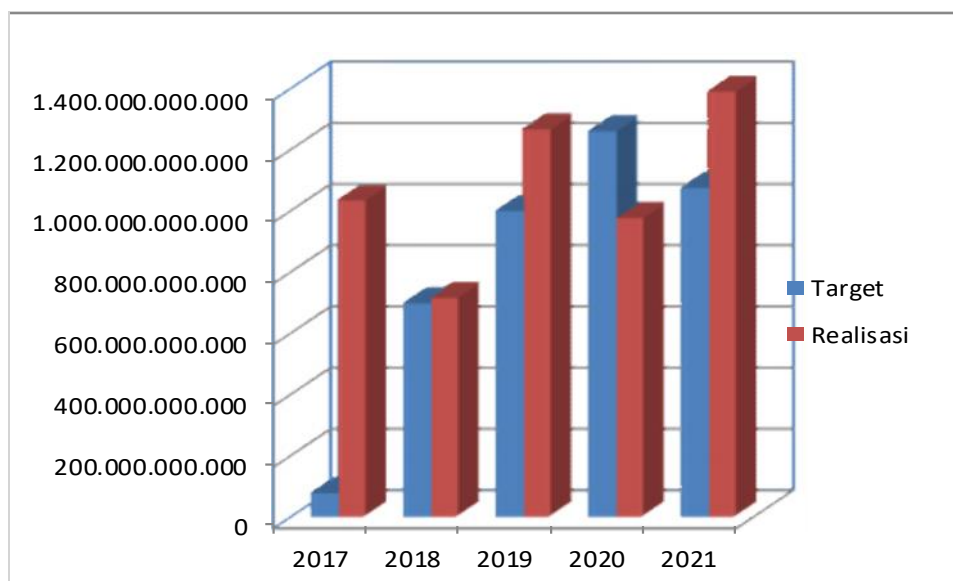
KPKNL Surabaya	Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	2b-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	Sd Q3	Q4	Y-21	Pol/KP
Target	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	33,44%	51,90%	76,06%	76,06%	76,06%	129,22%	129,22%	
Capaian	120%	120%	120%	108,66%	108,66%	120%	120%	

Tabel 3.9

Perbandingan Jumlah Pokok Lelang Tahun 2017 s.d 2021

Tahun	Target	Realisasi	%
2017	790.500.000.000,00	1.035.723.189.663,00	120,00%
2018	700.000.000.000,00	718.045.838.110,00	102,58%
2019	1.001.086.990.000,00	1.268.250.491.981,00	126,69%
2020	1.261.867.000.000,00	978.563.488.418,00	77,55%
2021	1.077.000.000.000,00	1.391.692.230.408,00	129,22%

Data jumlah pokok lelang dari tahun 2017 s.d. 2021 dalam bentuk grafik sebagai berikut :



Grafik 3.1

Perbandingan Jumlah Pokok Lelang Tahun 2017 s.d 2021

Capaian IKU tersebut di tahun 2021 mengalami kenaikan yang signifikan. Upaya yang telah dilakukan KPKNL Surabaya dalam rangka pencapaian IKU ini adalah dengan melakukan sosialisasi terkait dengan fitur baru dalam pendaftaran lelang di website www.lelang.go.id kepada pemohon lelang untuk mempermudah dalam pendaftaran lelang online, mempercepat pelayanan permohonan lelang melalui aplikasi permohonan lelang online, ikut berpartisipasi aktif memasarkan objek lelang bekerja sama dengan pihak pemohon lelang, mempercepat proses lelang ulang terutama untuk objek lelang yang nilai limitnya telah diturunkan oleh pemohon lelang, serta menambah jumlah perangkat komputer untuk layanan SKPT online dalam rangka mitigasi risiko bertambahnya frekuensi permohonan lelang di akhir tahun.

3. Sasaran Strategis 3: Birokrasi Dan Layanan Publik Yang **Agile**, Efektif, Dan Efisien

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik yang prima ditandai dengan terpenuhinya seluruh aspek penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi standar pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi, sarana dan prasarana, biaya/tarif pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan penilaian kinerja sehingga berdampak pada terwujudnya kepuasan dan terpenuhinya harapan pengguna layanan (*exceeding customer needs*).

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Surabaya mengidentifikasi 1 (satu) IKU, yaitu *Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL* yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.10

Capaian IKU Pada Sasaran Strategis Birokrasi dan Layanan Publik Yang Agile, Efektif, dan Efisien

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,60	4,90	120%

a. IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL (3a-CP)

Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kepuasan pengguna layanan atas layanan yang diberikan. Pelaksanaan survei lebih difokuskan pada penilaian atas penyelesaian layanan unggulan (*quick win*). Survei dilakukan dengan memberikan kuisisioner kepada pengguna layanan untuk menilai kualitas layanan yang telah diberikan.

Target indeks kepuasan pengguna layanan pada tahun 2021 sejumlah 4,60 dengan realisasi sebesar 4,90 atau sebesar 120%. Hasil ini diperoleh melalui **wawancara, telepon dan penyebaran kuesioner kepada stakeholder**.

Penyebaran kuisisioner masing-masing seksi dilakukan dengan rincian sebagai berikut:

- Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara dilakukan pada saat pelaksanaan sosialisasi, kunjungan ke satker maupun saat rekonsiliasi.
- Seksi Pelayanan Lelang dilakukan pada saat sosialisasi, pelaksanaan lelang maupun pada saat *stakeholder* melakukan konsultasi dan pengambilan risalah lelang.
- Seksi Pengurusan Piutang Negara menyebarkan kuesioner dilakukan pada saat kunjungan ke stakeholder maupun pada saat *stakeholder* konsultasi ke KPKNL.

Dengan hasil indeks tersebut dan juga dengan melihat hasil-hasil indeks tahun sebelumnya yang juga sudah di atas target maka KPKNL Surabaya akan

berkomitmen untuk mempertahankan dan berusaha meningkatkan indeks capaian tersebut.

Tabel 3.11

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL

KPKNL Surabaya	Birokrasi dan Layanan Publik Yang <i>Agile</i> , Efektif, dan Efisien							
	3a-CP Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	Sd Q3	Q4	Y-21	Pol/KP
Target						4,60	4,60	Max/ TLK
Realisasi						4,90	4,90	
Capaian						120, 00%	120, 00%	

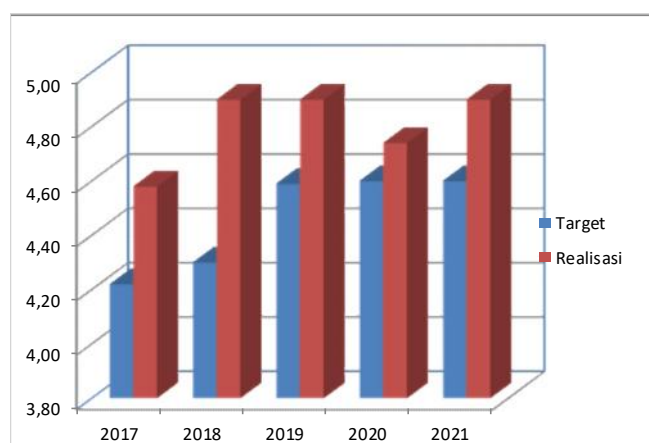
Penetapan target indeks kepuasan pengguna layanan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 selalu tercapai. Hal ini menandakan semakin meningkatnya kepuasan pengguna layanan KPKNL Surabaya terhadap layanan yang diberikan stakeholder di bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan lelang.

Tabel 3.12

Perbandingan Capaian Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2017 s.d 2021

Tahun	Target	Realisasi	%
2017	4,22	4,58	108,53%
2018	4,30	4,90	114,06%
2019	4,59	4,90	106,75%
2020	4,60	4,74	103,04%
2021	4,60	4,90	120%

Data indeks Kepuasan Pengguna Layanan dapat dilihat dalam bentuk grafik sebagai berikut:



Grafik 3.2

Perbandingan capaian indeks kepuasan pengguna layanan tahun 2017 s.d 2021

Action plan yang akan dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan indeks kepuasan pengguna layanan dimaksud, yaitu melakukan monitoring dan evaluasi serta responsif atas pengaduan/keluhan dari pengguna jasa, mengintegrasikan standar prosedur layanan yang dilaksanakan oleh beberapa unit, dan membuat inovasi/terobosan pelayanan dengan tetap mengacu pada peraturan dan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang berlaku.

4. Sasaran Strategis 4: Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Dalam kaitannya dengan kekayaan negara, kegiatan tata kelola meliputi seluruh siklus pengelolaan barang milik negara, kekayaan negara lain-lain, kekayaan negara dipisahkan, penilaian, piutang negara, dan lelang. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian.

Tata kelola kekayaan negara yang akuntabel merupakan siklus pengelolaan kekayaan negara yang dimulai dari perencanaan, penatausahaan, penggunaan, pemanfaatan sampai dengan pemindahtanganan dan penghapusan.

Perencanaan merupakan rangkaian kegiatan perumusan rincian kebutuhan BMN untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu, sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.

Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan kekayaan Negara sesuai ketentuan yang berlaku yang bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan kekayaan Negara.

Penggunaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.

Pemanfaatan merupakan rangkaian kegiatan pendayagunaan BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dan/atau optimalisasi BMN dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Pemindahtanganan merupakan rangkaian kegiatan pengalihan kepemilikan BMN, sedangkan penghapusan merupakan rangkaian kegiatan menghapus BMN dari daftar barang Pengelola Barang/Pengguna Barang.

Pengamanan merupakan rangkaian kegiatan pengamanan kekayaan Negara melalui pengamanan fisik, pengamanan administrasi, dan pengamanan hukum

Akuntabel adalah penatausahaan dan pengamanan kekayaan Negara dilaksanakan sesuai dengan kaidah atau peraturan yang berlaku dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi, tertib hukum, dan tertib pengelolaan.

Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya, yang meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum.

Salah satu wujud dari perencanaan, penatausahaan yang akuntabel, penggunaan, rencana pemanfaatan, pemindahtanganan dan/atau penghapusan adalah dilakukan revaluasi aset untuk mengupdate nilai BMN dan dilakukannya koreksi atas hasil revaluasi BMN dimaksud.

Adapun pengamanan Barang Milik Negara berupa tanah adalah dengan cara melakukan pensertifikatan tanah menjadi atas nama Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Surabaya mengidentifikasi 3 (tiga) IKU, yaitu *Persentase Bidang Tanah BMN Yang Disertifikasi*, *Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)*, dan *Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian* yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.13

Capaian IKU pada Sasaran Strategis Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1. Persentase Bidang Tanah BMN Yang Disertifikasi	100%	102,30%	102,30%
2. Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	118,54%	118,54%
3. Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	22%	167,91%	120%

a. IKU Persentase Bidang Tanah BMN Yang Disertifikasi (4a-CP)

Pelaksanaan sertifikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 tahun 2009 tentang Pensertifikatan BMN berupa Tanah dengan tugas/kewajiban BPN, K/L dan DJKN.

Target bidang tanah BMN yang disertifikasi tahun 2021 pada KPKNL Surabaya adalah 87 bidang dan dapat tercapai 89 bidang atau sebesar 102,30%.

Tabel 3.14

Bidang Tanah BMN Yang Disertipikatkan

KPKNL Surabaya	Tata kelola kekayaan negara yang efektif							
	4a-CP Persentase bidang tanah BMN yang disertifikasi							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	Sd Q3	Q4	Y-21	Pol/KP
Target	-	20%	20%	60%	60%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	-	5,75%	5,75%	100%	100%	102,30%	102,30%	
Capaian	-	28,74%	28,74%	120%	120%	120%	120%	

Permasalahan yang dihadapi KPKNL Surabaya dalam pencapaian IKU ini adalah terdapat perbedaan data luas usulan dengan luas hasil pengukuran. Tindakan yang telah dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah melakukan koordinasi dengan satker dan kantor pertanahan setempat.

b. IKU Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) (4b-CP)

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis.

Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp 6.000 triliun (dengan mempertimbangkan hasil revaluasi aset).

Target tahun 2021 sebesar 329 BMN dan tercapai sebesar 390 BMN atau 118,54%.

Tabel 3.15

Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

KPKNL Surabaya	Tata kelola kekayaan negara yang efektif							
	4b-CP Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	Sd Q3	Q4	Y-21	Pol/KP
Target	15%	45%	45%	75%	75%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	2,12%	41,95%	41,95%	75,68%	75,68%	118,54%	118,54%	
Capaian	14,18%	93,21%	93,21%	100,91%	100,91%	118,54%	118,54%	

Dalam pencapaian IKU ini terdapat kendala yang dihadapi KPKNL Surabaya, yaitu karena adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang disebabkan pandemi covid-19 yang terjadi, hal tersebut menghambat pelaksanaan survei lapangan. Tindakan yang telah dilakukan

KPKNL Surabaya adalah berkoordinasi langsung dengan satker sekaligus melaksanakan survei lapangan.

Action plan yang akan dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan IKU ini yaitu menyampaikan surat kepada satker untuk mengirimkan data potofolio aset dan melaksanakan survei lapangan terhadap BMN yang menjadi target portofolio.

c. IKU Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian (4c-CP)

Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama.

Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian.

Target IKU Deviasi ketergunaan hasil penilaian tahun 2021 sebesar 22%, dan realisasi sebesar 7,06% atau 167,91%.

Tabel 3.16

Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian

KPKNL Surabaya	Tata kelola kekayaan negara yang efektif							
	4c-CP Deviasi ketergunaan hasil penilaian							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	Sd Q3	Q4	Y-21	Pol/KP
Target	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	Max/
Realisasi	6,75%	4,60%	4,60%	8,64%	8,64%	7,06%	7,06%	Average
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Permasalahan yang dihadapi oleh KPKNL Surabaya dalam pencapaian IKU ini adalah terdapat beberapa pengajuan nilai usulan permohonan pemanfaatan/ penghapusan dari pengguna barang yang terlalu tinggi dikarenakan hanya menggunakan harga taksiran, sehingga terdapat beberapa nilai wajar hasil perhitungan tim penilai di bawah nilai usulan permohonan penilaian, sehingga mengakibatkan deviasi antara nilai hasil penilaian dengan nilai hasil persetujuan.

Tindakan yang telah dilakukan KPKNL Surabaya dalam menghadapi permasalahan tersebut yaitu melakukan edukasi kepada pengguna barang terkait besaran nilai usulan permohonan pemanfaatan/ penghapusan dan melakukan koordinasi dan konfirmasi kepada pengguna barang dan seksi teknis terkait besaran nilai usulan permohonan.

5. Sasaran Strategis 5: Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian.

Tata kelola yang efektif adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (good governance) serta tunduk pada peraturan yang berlaku dan memberikan hasil yang tepat guna.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Surabaya mengidentifikasi 4 (empat) IKU, yaitu *Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN*, *Persentase Produktivitas Lelang*, *Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction*, dan *Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN* yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.17

Capaian IKU Pada Sasaran Strategis Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1. Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	100%	100%	100%
2. Persentase Produktivitas Lelang	35%	30,48%	87.08%
3. Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%	99,62%	108,28%
4. Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	12,5%	0,25%	120%

a. IKU Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN (5a-CP)

IKU Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN dengan prioritas penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN.

Kriteria pengakuan capaian atas masing-masing komponen yaitu penyelesaian BKPN diukur dengan penjumlahan: BKPN Lunas, BKPN Penarikan, BKPN dikembalikan, dan BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).

Target IKU Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN tahun 2021 pada KPKNL Surabaya adalah 100% dengan jumlah 393 BKPN. Dan hal ini dapat terelalisasi sebesar 100%.

Tabel 3.18

Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN

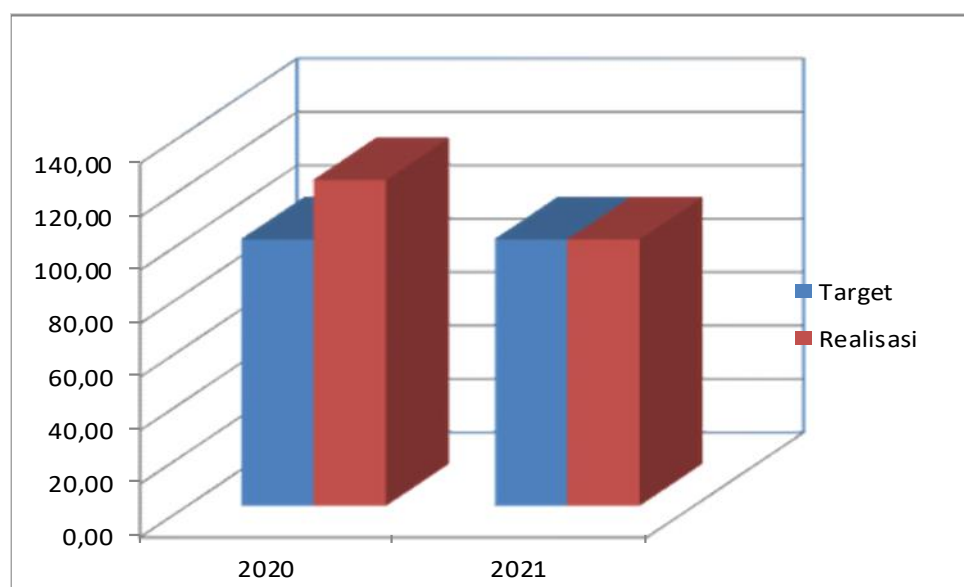
KPKNL Surabaya	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
	5a-CP Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	Sd Q3	Q4	Y-21	Pol/KP
Target	10%	40%	40%	75%	75%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	19,59%	36,39%	36,39%	49,87%	49,87%	100%	100%	
Capaian	78,37%	72,77%	72,77%	66,50%	66,50%	100%	100%	

Tabel 3.19

Perbandingan Persentase Penyelesaian BKPN

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
2020	100%	122,27%	122,27%
2021	100%	100%	100%

Secara grafik dapat dilihat sebagai berikut :

**Grafik 3.3**

Perbandingan Persentase Penyelesaian BKPN

Dalam mencapai IKU Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN, tindakan yang telah dilakukan KPKNL Surabaya adalah menyampaikan surat paksa dan melakukan penagihan secara langsung kepada penanggung hutang, melaksanakan penelitian lapangan atas BKPN yang berpotensi PSBDT, dan melakukan pengembalian BKPN penyerahan BPJS Ketenagakerjaan.

Action plan yang dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan IKU ini adalah melakukan penyampaian surat paksa dan melakukan penagihan secara langsung kepada penanggung hutang, melakukan pengembalian BKPN

penyerahan BPJS Ketenagakerjaan, dan melakukan pengurusan piutang negara sederhana.

b. IKU Persentase Produktivitas Lelang (5b-CP)

Produktivitas lelang dinilai dari seberapa intensitas frekuensi lelang yang laku. Apabila dalam satu frekuensi lelang terdapat lot barang yang laku dan tidak laku, maka tetap diperhitungkan sebagai sebagai satu frekuensi lelang laku.

Realisasi jumlah frekuensi lelang yang laku pada KPKNL Surabaya tahun 2021 sebesar 325 (28,03%) dari 1160 frekuensi lelang secara keseluruhan. Target tahun 2021 adalah 35%.

Tabel 3.20

Persentase Produktivitas Lelang

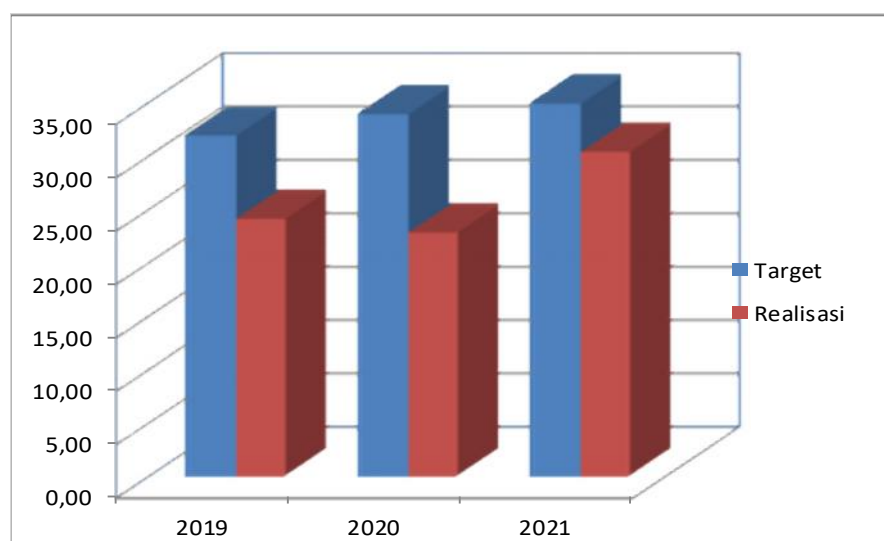
KPKNL Surabaya	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
	5b-CP Persentase Produktivitas Lelang							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	Sd Q3	Q4	Y-21	Pol/KP
Target	15%	20%	20%	25%	25%	35%	35%	Max/ TLK
Realisasi	27,96%	27,64%	27,64%	28,03%	28,03%	30,48%	30,48%	
Capaian	120%	120%	120%	112,07%	112,07%	87%	87%	

Tabel 3.21

Perbandingan Persentase Produktivitas Lelang

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
2019	32%	24,22%	69,44%
2020	34%	22,94%	67,47%
2021	35%	30,48%	87%

Secara grafik dapat dilihat sebagai berikut :



Grafik 3.4

Perbandingan Persentase Produktivitas Lelang

IKU Persentase Produktivitas Lelang belum mencapai target yang telah ditetapkan tahun 2021 dikarenakan di dalam range pelelang muda terutama lelang eksekusi persentase produktivitasnya rendah namun memiliki capaian yang besar.

Tindakan yang telah dilakukan oleh KPKNL Surabaya dalam mencapai IKU ini adalah dengan tetap melaksanakan lelang sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan, menambah jumlah counter layanan SKPT Online dalam rangka mitigasi risiko bertambahnya frekuensi permohonan lelang di akhir tahun, dan memfokuskan pelaksanaan lelang ulang atau lelang baru yang berpotensi mendongkrak persentase produktivitas lelang.

Action plan yang dilakukan untuk meningkatkan IKU Persentase Produktivitas Lelang adalah melakukan sosialisasi terkait fitur baru dalam pendaftaran lelang di website www.lelang.go.id kepada pemohon lelang untuk mempermudah pendaftaran lelang online, melakukan upaya pemasaran objek lelang yang bekerjasama dengan pihak pemohon lelang, menginventarisir permohonan lelang dengan jumlah nilai limit yang masih di harga pasar dengan yang memiliki potensi laku, dan melakukan koordinasi ke seksi PKN untuk meminta data persetujuan penghapusan BMN (yang berpotensi laku) agar dapat disegerakan permohonan lelangnya.

c. IKU Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction (5c-CP)

E-auction adalah pelaksanaan lelang oleh KPKNL yang memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) berbasis internet. E-auction ini terdiri dari 2 jenis, yaitu ALE (aplikasi lelang melalui email) dan ALI (aplikasi lelang melalui internet sehingga lebih real time dan terbuka).

Pemanfaatan TIK berbasis internet ini diharapkan dapat menghasilkan lelang yang lebih optimal dan transparan. Hal ini dikarenakan e-auction dapat menjaring peserta lebih luas serta peserta tidak diwajibkan hadir di tempat pelaksanaan lelang sehingga dapat meminimalisasi terjadinya pengaturan harga lelang.

Implementasi e-auction meliputi pelaksanaan lelang e-Auction adalah lelang tanpa kehadiran peserta lelang, serta E-Conventional Auction adalah lelang dengan kehadiran peserta lelang yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam pengelolaan infrastruktur pendukung lelang (pembayaran uang jaminan menggunakan Virtual Account).

Target capaian e-Auction dan e-Conventional Auction pada KPKNL Surabaya tahun 2021 adalah sebesar 92% dan berhasil terealisasi sebesar 99,62% atau dengan capaian 108,28%.

Tabel 3.22

Pelaksanaan Lelang *e-Auction dan e-Conventional Auction*

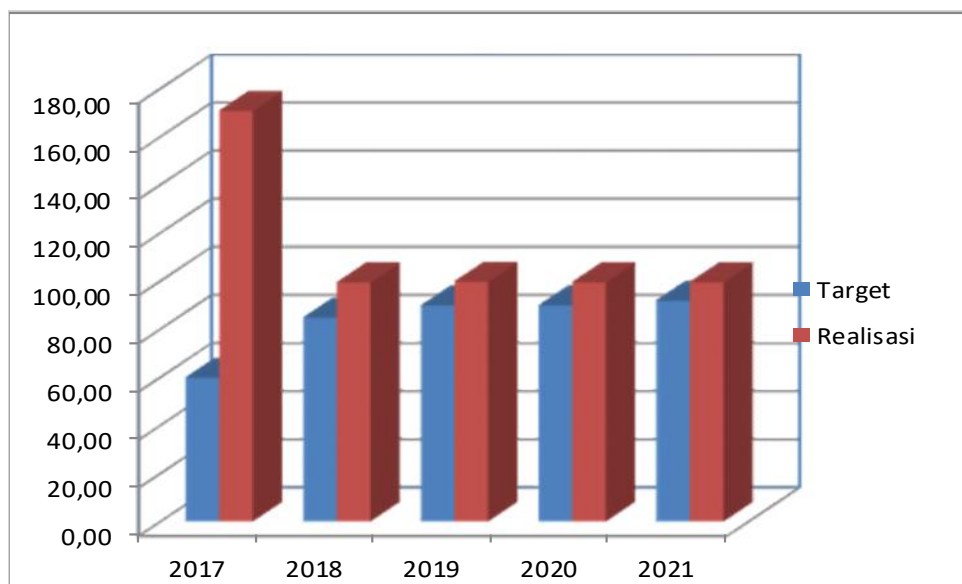
KPKNL Surabaya	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
	5c-CP Persentase pelaksanaan lelang <i>e-auction dan e-conventional auction</i>							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	Sd Q3	Q4	Y-21	Pol/KP
Target	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	Max/ TLK
Realisasi	99,70%	100%	100%	99,66%	99,66%	99,62%	99,62%	
Capaian	108,37%	120%	120%	108,32%	108,32%	108,28%	108,28%	

Tabel 3.23

Perbandingan Pelaksanaan Lelang *e-auction dan e-conventional auction*

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
2017	60%	170,93%	284,88%
2018	85%	99,61%	117,19%
2019	90%	99,89%	110,99%
2020	90%	99,64%	110,71%
2021	92%	99,62%	108,28%

Secara grafik dapat dilihat sebagai berikut :



Grafik 3.5

Perbandingan Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction

Implementasi IKU Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional masih didominasi lelang kayu perhutani sebagai lelang konvensional. Action plan

KPKNL Surabaya dalam meningkatkan pencapaian IKU ini adalah dengan mewajibkan pemohon lelang untuk mengajukan permohonan lelang secara online dan menggunakan cara penawaran tertulis melalui internet.

d. IKU Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN (5d-CP)

PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBP DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBP yang berasal dari Biad Pengurusan Piutang Negara dengan MAP: 425785 dan Bea Lelang dengan 425782, 425784 (PL I dan Pegadaian).

Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN, diukur dari selisih antara pembukuan PNBP MAP 425785 pada aplikasi Focus PN dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi, dan selisih antara pembukuan PNBP MAP 425782 dan 425784 pada aplikasi Dropbox/Aplikasi lain khusus lelang dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.

Rekonsiliasi antara kedua data tersebut dilakukan maksimal tanggal 7 pada setiap periode bulan berikutnya setelah periode bulan berakhir.

Target Deviasi PNBP dari Biad PPN adalah 15%. Target Deviasi PNBP dari Bea Lelang adalah 10%, sehingga rata-rata target 12,5%. Realisasi tahun 2021 pada KPKNL Surabaya adalah 0,25% dengan capaian 120%.

Tabel 3.24

Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN

KPKNL Surabaya	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
	5d-CP Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	Sd Q3	Q4	Y-21	Pol/KP
Target	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	
Realisasi	0,35%	1%	0,35%	0,50%	0,50%	0,25%	0,25%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Untuk meningkatkan capaian IKU Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN, KPKNL Surabaya melakukan upaya dengan cara melakukan penginputan data PNBP pada aplikasi focusPN dan dropbox secara tepat waktu dan akurat.

6. Sasaran Strategis 6: Edukasi Yang Efektif

Edukasi merupakan kegiatan pembinaan, bimbingan teknis, pemberian masukan, konsultasi, atau arahan yang dilaksanakan dalam lingkup internal maupun eksternal. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman atas proses bisnis yang

harus dilakukan baik oleh pihak internal maupun eksternal sehingga output yang ditetapkan dalam suatu pekerjaan dapat tercapai.

Ruang lingkup edukasi adalah edukasi internal dari atasan/unit superintenden kepada bawahan/unit yang diawasi, dan edukasi eksternal dari kantor wilayah/KPKNL kepada pengguna layanan/masyarakat umum.

Materi edukasi adalah terkait dengan pengelolaan barang milik negara, kekayaan negara lain-lain, kekayaan negara dipisahkan, pengurusan piutang negara, dan lelang.

Edukasi dapat dikatakan efektif apabila pihak yang diedukasi memberikan feedback yang positif atas tingkat pemahaman materi dan proses edukasi yang telah dilakukan.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Surabaya mengidentifikasi 1 (satu) IKU, yaitu *Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi* yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.25
Capaian IKU Pada Sasaran Strategis Edukasi Yang Efektif

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1. Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	96	97,76	101,83%

a. IKU Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi (6a-N)

Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi digunakan untuk mengukur persepsi peserta atas 1) tingkat pemahaman, 2) kualitas materi, 3) kualitas fasilitator, dan 4) kualitas pendukung pelatihan/sosialisasi yang dilaksanakan.

Proses edukasi dan komunikasi dilakukan dengan media seperti pelatihan, sosialisasi, atau workshop. IKU ini mengukur edukasi yang dilakukan oleh kanwil kepada pihak eksternal, seperti satuan kerja (K/L), pemohon lelang, pembeli lelang, masyarakat, dan lainnya. Kegiatan edukasi ini dilakukan paling tidak sebanyak dua kali dalam setahun (setiap semester satu kali).

Pembobotan atas empat indikator tersebut meliputi tingkat pemahaman peserta (bobot 70%), dengan pertimbangan fokus pelaksanaan edukasi adalah untuk meningkatkan pemahaman peserta, kualitas materi (bobot 15%), kualitas fasilitator (bobot 10%), dan kualitas fasilitas pelatihan (bobot 5%).

Target IKU ini tahun 2021 pada KPKNL Surabaya adalah 96 dan berhasil tercapai 97,76 atau 101,83%.

Tabel 3.26

Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi

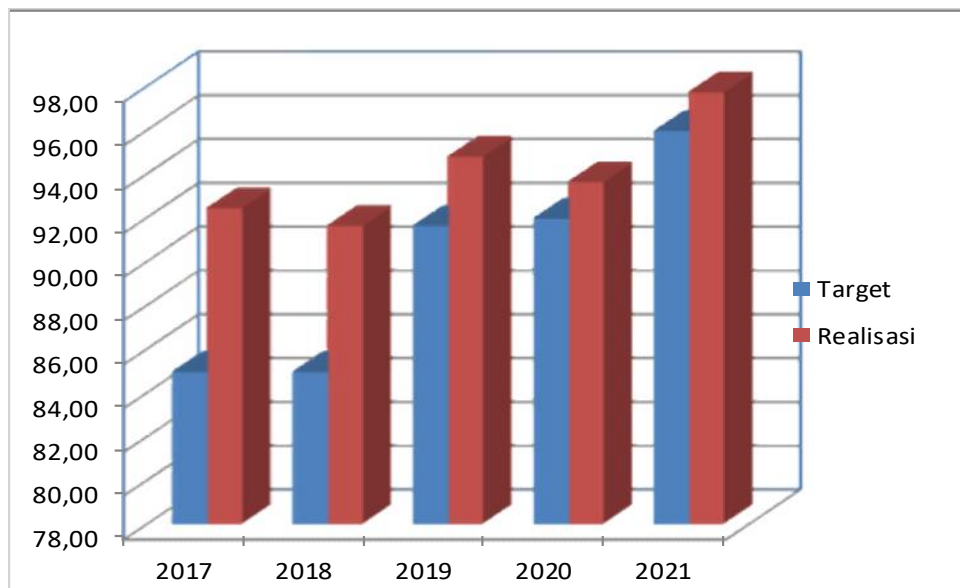
KPKNL Surabaya	Edukasi Yang Efektif							
	6a-N Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	Sd Q3	Q4	Y-21	Pol/KP
Target	-	96	96	-	96	96	96	Max/ Ave
Realisasi	-	97,31	97,31			98,20	97,76	
Capaian	-	101,36%	101,36%			101,83%	101,83%	

Tabel 3.27

Perbandingan tingkat efektifitas Edukasi dan komunikasi

Tahun	Target	Realisasi	%
2017	85	92,47	108,79%
2018	85	91,67	107,85%
2019	91,67	94,83	103,44%
2020	92	93,67	101,81%
2021	96	97,76	101,83%

Secara grafik dapat dilihat sebagai berikut:

**Grafik 3.6**

Perbandingan Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi

Dalam pencapaian IKU Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi, yang ditemui bahwa pengguna layanan dalam mengisi kuesioner berdasarkan fasilitas yang diberikan, bukan berdasarkan indikator nilai yang disampaikan dalam form kuesioner.

Action plan yang dilakukan untuk meningkatkan capaian IKU ini adalah dengan melakukan penegasan kriteria penilaian pada saat pelatihan, sosialisasi, atau workshop kepada pengguna layanan KPKNL Surabaya.

7. Sasaran Strategis 7: Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif

Pengendalian merupakan tindakan preventif dan korektif yang dilaksanakan apabila dari hasil pemantauan dan pengawasan ditemukan adanya penyimpangan atau kendala.

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan mengikuti prosedur/ketentuan yang berlaku.

Pengendalian dan pengawasan pengelolaan BMN dapat dikatakan efektif apabila memenuhi parameter yaitu terselesaikannya sengketa/permasalahan pengelolaan BMN yang ada serta menurunnya potensi permasalahan terkait BMN di masa mendatang, temuan aparat pemeriksa tuntas ditindaklanjuti, tidak ada temuan material/fraud terkait pengelolaan BMN, dan surat persetujuan pengelolaan BMN pada unit pengguna barang ditindaklanjuti.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Surabaya mengidentifikasi 1 (satu) IKU, yaitu *Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara* yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.28

Capaian IKU Pada Sasaran Strategis Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1. Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	85%	100%	117,65%

a. IKU Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara (7a-CP)

Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada Pengguna Barang terutama terkait tindak lanjut pengelolaan BMN. IKU ini difokuskan pada pemantauan tindak lanjut persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pengguna barang atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh DJKN selaku pengelola barang yang dibuktikan dengan dokumentasi.

Capaian IKU ini dihitung dengan membandingkan jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester II tahun 2020 s.d. semester I tahun 2021 yang ditindaklanjuti dan oleh satker K/L dengan jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester II tahun 2020 s.d. semester I tahun 2021.

Target tahun 2021 pada KPKNL Surabaya sebesar 85%, dan berhasil terealisasi sebesar 100% dengan capaian 117,65%.

Tabel 3.29

Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara

KPKNL Surabaya	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif							
	7a-CP Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	Sd Q3	Q4	Y-21	Pol/KP
Target	-	40%	40%	-	40%	85%	85%	Max/ TLK
Realisasi	-	55,47%	55,47%	59,25%	59,25%	100%	100%	
Capaian	-	120%	120%	120%	120%	117,65%	117,65%	

Bahwa terkait dengan IKU ini, terdapat kendala yang dihadapi yaitu satker belum melaporkan tindak lanjut pengelolaan BMN. Langkah yang telah diambil KPKNL Surabaya dalam mengatasi kendala tersebut adalah dengan menyampaikan surat kepada satker (S-5158/WKN.10/KNL.01/2021 tanggal 01 Nopember 2021) dan berkoordinasi langsung dengan satker yang belum menyampaikan laporan pemanfaatan dan penjualan BMN. .

8. Sasaran Strategis 8: SDM Yang Kompeten

SDM yang kompeten adalah SDM yang memiliki kualitas kepemimpinan yang kuat, kompetensi teknis yang mumpuni, serta tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai organisasi.

KPKNL Surabaya dalam pencapaian sasaran strategis ini, mengidentifikasi 1 (satu IKU yaitu *Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai*, yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.30

Capaian IKU Pada Sasaran Strategis SDM Yang Kompeten

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1. Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%	119,53%	119%

a. IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai (8a-N),

IKU ini mengukur persentase banyaknya pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya. Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 24 JP, serta minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan, dan minimal 1 yang sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pegawai yang dimaksud adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja aktif di Kementerian Keuangan. Dikecualikan dari formula IKU ini adalah bawahan yang akan pensiun di tahun 2021; bawahan yang sedang/dalam status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan; bawahan yang aktif kembali dari status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan setelah 30 September 2021; pegawai yang mutasi setelah 30 November 2021 tidak diperhitungkan di unit barunya; dan pegawai pada unit non-eselon.

Formula capaian IKU ini diperoleh dari capaian utama ditambah dengan capaian tambahan. Target tahun 2021 adalah 100% dan berhasil tercapai sebesar 119,53%.

Tabel 3.31

Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

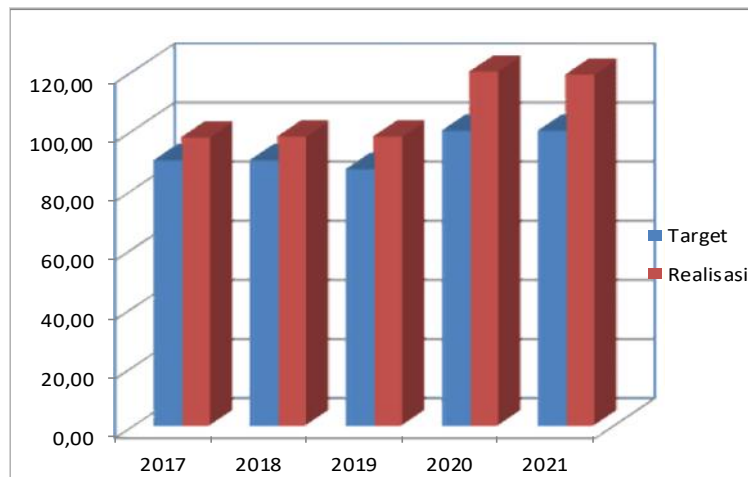
KPKNL Surabaya	SDM yang Kompeten							
	8a-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	Sd Q3	Q4	Y-21	Pol/KP
Target	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	10,91%	117,73%	117,73%	122,27%	122,27%	119,53%	119,53%	
Capaian	72,73%	120%	120%	120%	120%	119%	119%	

Tabel 3.32

Perbandingan Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai Tahun 2017 s.d 2021

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	%
2017	90%	97,73%	108,59%
2018	90%	98%	108,46%
2019	87%	96%	110,56%
2020	100%	120%	120%
2021	100%	119,53%	119%

Secara grafik dapat dilihat sebagai berikut:



Grafik 3.7

Perbandingan persentase pengembangan kompetensi pegawai tahun 2017 s.d 2021

Target IKU ini dapat tercapai dengan baik dikarenakan KPKNL Surabaya selalu mendorong dan memotivasi pegawai untuk mengikuti pelatihan, baik yang klasikal maupun non klasikal.

9. Sasaran Strategis 9: Organisasi Yang *Fit For Purpose*

Organisasi yang *fit-for-purpose* adalah organisasi yang memiliki desain struktur dan mekanisme kerja (*value chain*) yang selaras dengan tujuan organisasi.

Sasaran Srategis ini diidentifikasi dengan 2 (dua) IKU yaitu *Nilai Pemenuhan Unit Kerja Terhadap Kriteria ZI Menuju WBK/WBBM*, *Nilai Hasil Reviu Pengelolaan Kinerja*, dan *Indeks Efektivitas Penyelenggaraan FGD Pejabat Administrator*. yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.33

Capaian IKU Pada Sasaran Strategis Organisasi Yang Fit For Purpose

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1. Nilai Pemenuhan Unit Kerja Terhadap Kriteria ZI Menuju WBK/WBBM	85	95,56	112,42%
2. Nilai Hasil Reviu Pengelolaan Kinerja	75	87,24	116,32%
3. Indeks Efektivitas Penyelenggaraan FGD Pejabat Administrator	80	97,67	120%

a. IKU Nilai Pemenuhan Unit Kerja Terhadap Kriteria ZI Menuju WBK/WBBM (9a-N)

Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi – Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) yang berbasis integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda).

Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan PermenPAN-RB Nomor 10 Tahun 2019.

Menindaklanjuti PermenPAN-RB 52/2014 sebagaimana telah diubah dengan PermenPAN-RB Nomor 10 Tahun 2019, akan dilakukan seleksi internal unit kerja yang memenuhi kriteria WBK/WBBM yang dapat direkomendasikan untuk diajukan kepada KemenPAN-RB untuk dilakukan penilaian secara nasional.

Predikat ZI menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, dengan nilai komponen pengungkit minimal 75, indikator terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN dengan nilai minimal 18,5 yang terdiri dari sub komponen survei persepsi anti korupsi minimal 13,5 dan sub komponen persentasi TLHP minimal 5, serta indikator terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat minimal 16.

Predikat ZI menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan nilai komponen pengungkit minimal 85, indikator terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN dengan nilai minimal 18,5 yang terdiri dari sub komponen survei persepsi anti korupsi minimal 13,5 dan sub komponen persentasi TLHP minimal 5, serta indikator terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat minimal 18.

Pada tahun 2020 DJKN mengusulkan 34 unit kerja untuk mengikuti penilaian WBK/WBBM, dengan rincian WBK : 28 unit kerja dan WBBM : 6 unit kerja. Dan tahun 2021 KPKNL Surabaya berhasil meraih predikat membanggakan dari Kementerian PANRB yaitu sebagai salah satu unit kerja di Kementerian Keuangan dengan predikat WBBM.

Target IKU ini tahun 2021 pada KPKNL Surabaya sebesar 85, dan berhasil tercapai sebesar 95,56 atau 112,42%.

Tabel 3.34

Nilai Pemenuhan Unit Kerja Terhadap Kriteria ZI Menuju WBK/WBBM

KPKNL Surabaya	Organisasi yang <i>fit for purpose</i>							
	9a-N Nilai Pemenuhan Unit Kerja Terhadap Kriteria ZI Menuju WBK/WBBM							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	Sd Q3	Q4	Y-21	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	85	85	Max/ TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	95,56	95,56	
Capaian	-	-	-	-	-	112,42%	112,42%	

Upaya KPKNL Surabaya dalam melaksanakan IKU ini adalah dengan melakukan pembentukan Tim WBBM yang melibatkan seluruh pegawai, baik PNS maupun Non PNS. Selain dari itu juga melaksanakan internalisasi tentang pembangunan ZI WBBM dan mendokumentasikan dokumen-dokumen pembangunan ZI WBBM. Terbukti upaya yang telah dilakukan tersebut membuahkan hasil yang bagus, yaitu berdasarkan Keputusan Menteri PAN RB Nomor 1742 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBJ) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Tahun 2021, KPKNL Surabaya sebagai salah satu unit kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan berhasil meraih predikat WBBM dari Kementerian PANRB. Predikat WBBM yang telah diraih KPKNL Surabaya bukan simbol semata, namun harus dipertahankan dan diwujudkan dalam bentuk pelayanan kepada seluruh pengguna layanan/*stakeholder*, sebagaimana yang tercantum dalam slogan KPKNL Surabaya yaitu Wilayah Amanah Berintegritas Cepat dan Akuntabel “(WANI CAK)”.

b. IKU Nilai Hasil Reviu Pengelolaan Kinerja (9b-N)

Review Pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi dan intensitas edukasi pengelolaan kinerja.

Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi, yaitu perencanaan (kualitas substansi dan dokumentasi) dengan bobot 25%, pelaksanaan/eksekusi (kualitas substansi dan dokumentasi) dengan bobot 30%, monitoring dan evaluasi (kualitas substansi dan dokumentasi) dengan bobot 30%, dan intensitas edukasi kinerja (kualitas substansi dan dokumentasi) dengan bobot 15%.

Target tahun 2021 pada KPKNL Surabaya sebesar 75, berhasil terealisasi sebesar 87,24 atau 116,32%.

Tabel 3.35

Nilai Hasil Reviu Pengelolaan Kinerja

KPKNL Surabaya	Organisasi yang <i>fit for purpose</i>							
	9b-N Nilai Hasil Reviu Pengelolaan Kinerja							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	Sd Q3	Q4	Y-21	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	75	75	Max/ TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	87,24	87,24	
Capaian	-	-	-	-	-	116,32%	116,32%	

Dalam melaksanakan IKU ini, KPKNL Surabaya berupaya sungguh-sungguh agar dapat tercapai yaitu dengan melakukan sosialisasi kontrak kinerja kepada seluruh pegawai di lingkungannya, melaksanakan *knowledge sharing* tentang pengelolaan kinerja, dan mengikuti berbagai pelatihan pengelolaan kinerja. *Action plan* untuk meningkatkan capaian IKU ini adalah dengan meningkatkan pemahaman pengelola kinerja organisasi terhadap pengelolaan kinerja.

c. IKU Indeks Efektivitas Penyelenggaraan FGD Pejabat Administrator (9c-N)

Tingkat efektivitas FGD Pejabat Administrator merupakan instrumen penilaian untuk mengukur keaktifan Pejabat Administrator dalam melakukan komunikasi internal melalui FGD kepada pegawai di lingkungannya termasuk mengukur mengenai kecepatan pelaksanaan FGD dan feedback peserta (pegawai di bawah koordinasi Pejabat Administrator terkait) terhadap kegiatan FGD yang dilaksanakan.

Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui kuesioner yang dikoordinir oleh Setjen (CTO). Kegiatan FGD dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan terkait Pelaksanaan Forum Group Discussion. Fokus materi FGD akan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal melalui surat Kepala Biro SDM atas nama Sekretaris Jenderal kepada Sekretaris Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.

Parameter yang diukur berdasarkan dua aspek yaitu kecepatan (seberapa cepat materi FGD disampaikan kepada pegawai sejak pelaksanaan Pra-FGD) dan feedback peserta yang terdiri dari content, delivery, dan contribution.

Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui data pelaksanaan FGD yang ada di e-performance masing-masing Pejabat Administrator, dan kuesioner yang dikoordinir oleh Setjen (CTO). Aspek yang diukur dengan kuesioner (feedback) dari peserta (bawahan) yaitu content (topik materi dan

pesan yang disampaikan), delivery (cara penyampaian materi oleh Pejabat Administrator), dan contribution (dampak kegiatan FGD terhadap peningkatan kapasitas pegawai).

Target tahun 2021 pada KPKNL Surabaya sebesar 80, berhasil terealisasi sebesar 97,67 atau 120%.

Tabel 3.36

Indeks Efektivitas Penyelenggaraan FGD Pejabat Administrator

KPKNL Surabaya	Organisasi yang <i>fit for purpose</i>							
	9c-N Indeks Efektivitas Penyelenggaraan FGD Pejabat Administrator							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	Sd Q3	Q4	Y-21	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	Max/ TLK
Realisasi	97,5	96,6	97,05	99,4	97,83	97,67	97,67	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Dalam pencapaian IKU ini, KPKNL Surabaya melaksanakan kegiatan FGD Pejabat Administrator secara tepat waktu.

10. Sasaran Strategis 10: Pengelolaan Keuangan Yang Optimal

Salah satu sumber daya organisasi sektor publik/pemerintahan adalah anggaran. Anggaran yang tersedia harus dikelola dengan berkualitas yang ditandai dengan anggaran terserap sesuai rencana yang telah ditetapkan, tercapainya output, efisiensi, konsistensi pelaksanaan anggaran, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan dana adalah DIPA. DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang sesuai dengan ketentuan menjadi dasar pengelolaan belanja.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Surabaya mengidentifikasi 1 (satu) IKU yaitu *Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran* yang capaiannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.37

Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%	95,5%	100%

a. IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (10a-CP),

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat,

efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan SE-8/MK.1/2020 meliputi cara dan formulasi perhitungan IKU terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

Aspek kualitas terdiri atas pencapaian keluaran, efisiensi, penyerapan anggaran atas pagu neto, dan konsistensi. Aspek tata kelola dan administratif terdiri atas Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan Uang Persediaan (UP), Data Kontrak, Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM), Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Perencanaan Kas (Renkas), Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Pagu Minus, dan Dispensasi.

Target tahun 2021 pada KPKNL Surabaya sebesar 95,5% dan realisasinya 95,5% atau dengan capaian 100%.

Tabel 3.38

Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

KPKNL Surabaya	Pengelolaan Keuangan Yang Optimal							
	10a-CP Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	Sd Q3	Q4	Y-21	Pol/KP
Target	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	Max/ TLK
Realisasi	95,5%	87,25%	87,25%	90,81%	90,81%	95,5%	95,5%	
Capaian	100%	91,36%	91,36%	95,09%	95,09%	100%	100%	

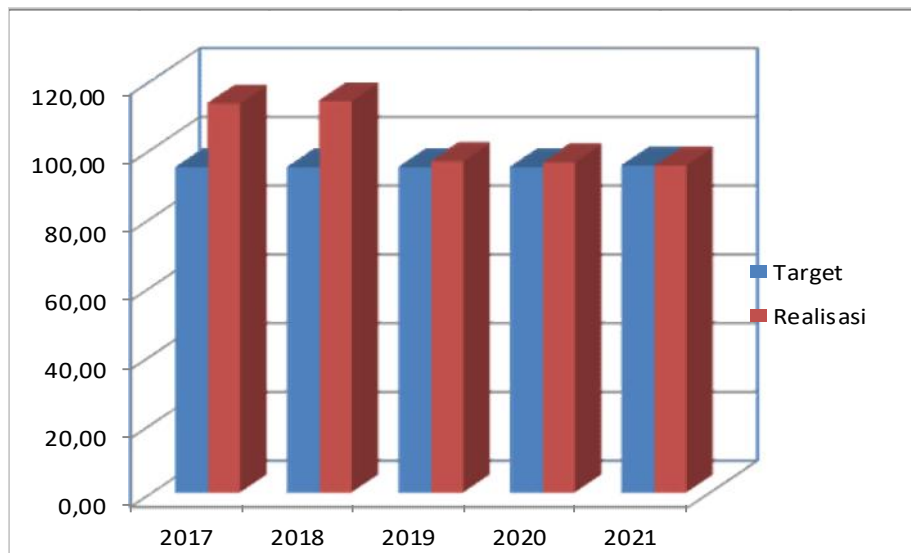
Perbandingan realisasi persentase kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2017 s.d. 2021 dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 3.39

Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
2017	95%	113,50%	113,50%
2018	95%	114,21%	120,00%
2019	95%	96,72%	101,81%
2020	95%	96,41%	101,48%
2021	95,5%	95,41%	100,00%

Dalam bentuk grafik dapat dilihat sebagai berikut:



Grafik 3.8

Target dan Realisasi Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

B. Realisasi Anggaran

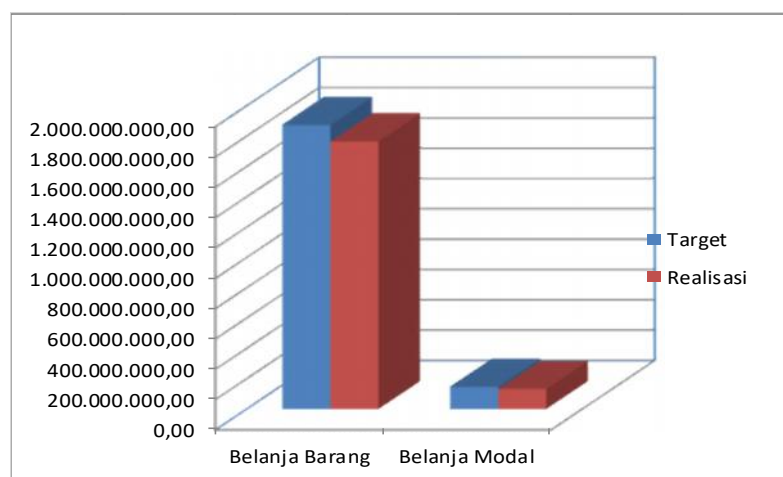
Sesuai dengan DIPA tahun 2021 alokasi dana KPKNL Surabaya sebesar Rp2.026.487.000 dan realisasi penyerapan DIPA sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.40

Target dan Realisasi Penyerapan Anggaran

DIPA KPKNL SURABAYA TA 2021

No.	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran	% Realisasi
1	Belanja Barang	1.877.203.000	1.768.167.630	109.035.370	94%
2	Belanja Modal	149.284.000	136.314.000	12.970.000	91%
	Total Belanja	2.026.487.000	1.904.481.630	122.005.370	94%



Grafik 3.9

Target dan Realisasi Penyerapan Anggaran

Realisasi PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) KPKNL Surabaya pada tahun 2021 terdiri dari Penerimaan dari Bea Lelang, Penerimaan dari Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (Biad PPN) dan Pendapatan Lain-lain dengan capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.41

Tabel Penerimaan Negara Bukan Pajak

No	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Pendapatan dari Pemindahan BMN Lainnya	0	
2.	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	195.130.034,00	
3.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	52.600.000,00	
4.	Pendapatan Jasa Lainnya	500.000,00	
5.	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	6.397.088.986,00	
6.	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	43.116.051.947,00	
7.	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	
8.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	
	Jumlah	49.761.370.967,00	

C. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

- a. Pada tahun 2021, KPKNL Surabaya berhasil predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Predikat tersebut diberikan oleh Kementerian PABRB dalam acara Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas WBK/WBBM yang diikuti secara daring oleh Pejabat dan Pegawai KPKNL Surabaya.
- b. Selama proses pembangunan ZI WBBM, KPKNL Surabaya telah membuat beberapa inovasi dalam rangka memperkuat komitmen anti korupsi dan meningkatkan layanan kepada pengguna jasa. Inovasi tersebut antara lain:
 1. buku tamu digital
inovasi layanan ini berbasis google form dimana para pengguna jasa layanan yang mengunjungi KPKNL Surabaya diwajibkan untuk mengisi buku tamu digital

sebelum memasuki APT. Pengguna jasa layanan dapat mengaksesnya dengan melalui portal layanan atau dengan memindai QR code.

2. layanan SKPT online

layanan SKPT online ini merupakan layanan pra lelang bagi pemohon lelang. Layanan ini memangkas waktu layanan yang sebelumnya dilayani oleh Kantor Pertanahan setempat. Layanan SKPT online ini dilakukan di tempat khusus yang dinamakan Pojok Wani dan dilayani oleh petugas khusus. Apabila data yang tervalidasi secara tepat, maka SKPT online ini dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 30 menit dengan biaya Rp.0.

3. layanan penerbitan kode billing pembayaran BPHTB online

layanan ini juga dilayani di Pojok Wani sebagaimana layanan SKPT. Layanan ini membantu para pemenang lelang membayar BPHTB, tanpa datang ke kantor layanan BPHTB pemerintah daerah. Layanan ini sementara tersedia untuk pemerintah daerah yang telah menerapkan e-BPHTB yaitu Kota Surabaya, kab. Gresik dan Kab. Nganjuk.

4. elektronik form (*e-form*) permohonan layanan pasca lelang

penggunaan *e-form* merupakan solusi di masa pandemi. Dengan *e-form* ini permohonan pasca lelang dapat diakses secara mobile dan data yang telah terekam dapat diakses oleh Bendahara Penerimaan dan Pelelang untuk mempersiapkan dokumen pasca lelang seperti kuitansi, validasi dan bukti setor PPh dan kutipan Risalah Lelang.

5. survey kepuasan layanan digital

setelah mendapatkan layanan, stakeholder dapat mengisi survey kepuasan pengguna layanan secara digital dengan mengakses link atau QR code yang tersedia di APT atau ruang konsultasi.

6. validasi PPh online

layanan validasi PPh online ini dilakukan oleh Bendahara Penerimaan melalui laman DJP online menu e-PHTB. Layanan ini sangat membantu pemenang lelang karena mendapatkan layanan di KPKNL Surabaya tanpa harus datang ke KPP setempat.

7. pakta integritas layanan

pakta integritas layanan merupakan salah satu komitmen anti korupsi KPKNL Surabaya yang ditandatangani oleh pemohon layanan dan pemberi layanan. Para pengguna jasa layanan seperti layanan pasca lelang selain mengisi form permohonan, juga menandatangani pakta integritas sebagai janji untuk tidak memberikan sesuatu kepada pemberi layanan (KPKNL Surabaya).

Inovasi Layanan SKPT online, penerbitan kode billing pembayaran BPHTB online dan elektronik form (*e-form*) permohonan layanan pasca lelang telah mendapatkan

rekomendasi untuk direplikasi dalam memberikan layanan lelang sesuai dengan Nota Dinas Direktur Lelang Nomor ND-375/KN.7/2021 tanggal 30 Maret 2021. Adapun KPKNL lainnya yang telah melakukan replikasi layanan adalah KPKNL Madiun, KPKNL Jember dan KPKNL Makasar.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) KPKNL Surabaya ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi KPKNL Surabaya menuju *good governance* dengan mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Penyusunan LAKIN ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. LAKIN ini merupakan LAKIN tahun kedua pelaksanaan RPJMN Tahun 2020-2024.

A. Kesimpulan Umum Capaian Kinerja KPKNL Surabaya

Keberhasilan KPKNL Surabaya tergambar dalam pencapaian target IKU dengan status capaian HIJAU dengan **Nilai Kinerja Organisasi sebesar 111,59%**, sehingga tahun 2021 ini KPKNL Surabaya telah berhasil mencapai kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai instansi pemerintah.

Keberhasilan ini membuktikan bahwa KPKNL Surabaya selalu mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan manajemen kinerja yang baik dalam pencapaian target, pembangunan manajemen sumber daya manusia ataupun pelayanan kepada *stakeholder*.

B. Langkah Strategis Untuk Tahun Yang Akan Datang

Untuk tahun 2021 ini, Indikator Kinerja Utama (IKU) KPKNL Surabaya berstatus hijau kecuali IKU Persentase produktifitas lelang dengan status capaian kuning. Beberapa komponen dari IKU tersebut perlu ditingkatkan agar pencapaiannya lebih signifikan dari target yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan dan strategi KPKNL Surabaya dalam rangka mendukung pencapaian target adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara antara lain:

- 1) penatausahaan dan pengamanan kekayaan negara yang akuntabel;
- 2) pengawasan dan pengendalian yang efektif;
- 3) laporan Barang Milik Negara (BMN) yang tertib dan akuntabel serta dapat dipakai dalam berbagai kepentingan;
- 4) Peningkatan kontribusi penerimaan PNB

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara adalah:

- 1) monitoring dan evaluasi pengelolaan BMN dari perencanaan sampai dengan penghapusan;
 - 2) percepatan sertifikasi BMN berdasarkan *database* tanah BMN yang andal dan *reliable*;
 - 3) meningkatkan kualitas penyajian nilai BMN yang wajar di dalam Laporan BMN dan LKPP sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN;
 - 4) Peningkatan kualitas SDM satker K/L melalui sosialisasi, *workshop*, *focus group discussion* dll;
 - 5) Melakukan pemetaan aset-aset BMN yang potensial dan strategis dalam rangka pemanfaatan aset BMN;
- b. Peningkatan kualitas perencanaan kebutuhan BMN
- Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan kebutuhan BMN adalah perencanaan kebutuhan BMN yang akuntabel.
- Adapun strategi yang untuk mewujudkannya adalah :
- 1) Menyiapkan *database* BMN yang lengkap, tertib dan *reliable*;
 - 2) Melaksanakan regulasi yang terkait dengan perencanaan kebutuhan BMN dengan baik dan terukur;
 - 3) Peningkatan kualitas SDM satker K/L melalui sosialisasi, *workshop*, *focus group discussion* dll;
- c. Optimalisasi pengelolaan aset kredit dan aset properti
- Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan optimalisasi pengelolaan aset kredit dan aset properti adalah penerimaan pembiayaan dari aset *recovery* yang optimal.
- Adapun strategi yang dilakukan untuk mewujudkan penerimaan pembiayaan dari aset *recovery* yang optimal antara lain:
- 1) penyelesaian Piutang Negara yang mempunyai nilai *outstanding* besar atau *high profile*;
 - 2) optimalisasi/ percepatan tahapan pengurusan Piutang Negara;
 - 3) verifikasi fisik aset properti yang telah diserahkan ke KPKNL dari Kantor Pusat DJKN
- d. Peningkatan Pelayanan Penilaian
- Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan penilaian adalah:
- 1) Pengembangan Penilai yang profesional melalui diklat penilaian dan pelaksanaan *quality assurance* yang berkelanjutan;
 - 2) Penguatan jabatan fungsional Penilai;

- 3) *database* penilaian yang andal dan *reliable* serta dapat digunakan untuk berbagai kepentingan;

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan penilaian antara lain:

- 1) pelaksanaan penilaian sesuai dengan standar dan regulasi penilaian yang telah ditetapkan;
- 2) optimalisasi/ percepatan pelayanan penilaian;
- 3) peningkatan kualitas penilai internal melalui *knowledge sharing* dan *focus group discussion* serta pembinaan yang berkelanjutan dari Kanwil dan Kantor Pusat;

Disamping itu, KPKNL Surabaya akan menjalankan program kerja yang berkesinambungan yang substansinya adalah sebagai berikut :

1. Memberikan edukasi kepada satker di wilayah kerja KPKNL Surabaya dalam hal menggunakan metode menilai/menaksir BMN peralatan dan mesin, sehingga diharapkan dapat mendukung kelancaran proses penghapusan BMN peralatan dan mesin;
 2. Terus meningkatkan kompetensi penilai internal KPKNL Surabaya dengan menitikberatkan pengembangan kualitas SDM dan pembentukan *database* penilaian;
 3. Koordinasi dan penggalian potensi penilaian kepada *stakeholder*;
- e. Optimalisasi pengurusan piutang negara
- Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka optimalisasi pengurusan piutang negara adalah:
- 1) Pengurusan piutang negara yang optimal;
 - 2) Peningkatan kontribusi penerimaan PNBPN;
 - 3) Peningkatan pencapaian PNDS dan penyelesaian BKPN.

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan optimalisasi pengurusan piutang negara adalah :

- 1) kegiatan pemeriksaan terhadap BKPN penyerahan dari Direktorat PKNSI;
- 2) optimalisasi/ percepatan tahapan pengurusan piutang negara;
- 3) pemanggilan debitor melalui media massa;
- 4) melakukan kunjungan dan penagihan langsung pada debitor yang potensial;
- 5) Melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap BKPN yang telah optimal untuk ditingkatkan pengurusannya ke PSBDT, guna mengurangi outstanding BKPN dan nilai hutangnya.

f. Peningkatan pelayanan lelang

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan pelayanan lelang adalah:

- 1) Pelayanan lelang yang optimal;
- 2) Peningkatan PNPB dari pelaksanaan lelang.

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan lelang adalah sebagai berikut :

- 1) sosialisasi mengenai penjualan lelang dan modernisasinya melalui *e-auction* dengan simulasi lelang, lelang expo, *press release* media massa dan kegiatan lainnya;
- 2) peningkatan kualitas SDM Pelelang/ Pejabat Lelang dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- 3) penggalan potensi lelang untuk seluruh jenis lelang;

g. Kesenambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan adalah:

- 1) organisasi yang *fit for purpose*;
- 2) SDM yang kompetitif;
- 3) sistem informasi manajemen yang terintegrasi;
- 4) peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan kekayaan negara.

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan adalah:

- 1) restrukturisasi/penataan dan penajaman tugas dan fungsi unit kerja;
- 2) pengembangan pegawai yang baik dan berkelanjutan;
- 3) pelaksanaan Arsitektur TIK yang komprehensif;
- 4) pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai *core bussiness*;

h. Peningkatan efektivitas tata kelola, pengendalian intern, pengelolaan kinerja, dan manajemen risiko;

- 1) optimalisasi fungsi unit kepatuhan internal;
- 2) peningkatan efektivitas layanan kehumasan.

Akhirnya dengan disusunnya LAKIN ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas pokok fungsi KPKNL Surabaya, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal LAKIN tersebut harus dijadikan motivator untuk lebih

meningkatkan kinerja organisasi, sedangkan secara eksternal LAKIN harus selalu menjadi sebuah indikator dalam menyesuaikan perkembangan tuntutan *stakeholder*, sehingga pada akhirnya KPKNL Surabaya dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan memberikan pelayanan yang cepat, tepat, transparan dan profesional. Terbukti tahun 2021 KPKNL Surabaya berhasil meraih predikat sebagai salah satu unit kerja di Kementerian Keuangan yang berpredikat WBBM dengan mottonya *"KPKNL Surabaya sebagai Wilayah Amanah Berintegritas Cepat dan Akuntabel (WANI CAK)."*

LAMPIRAN

FOTO-FOTO KEGIATAN



PENILAIAN PEMBANGUNAN ZI WBBM OLEH TPN KEMENPAN RB



PENILAIAN PEMBANGUNAN ZI WBBM OLEH TPN KEMENPAN RB



PENILAIAN PEMBANGUNAN ZI WBBM OLEH TPN KEMENPAN RB

FOTO-FOTO KEGIATAN



APRESIASI PENGANUGERAHAN PREDIKAT WBK/WBBM



APRESIASI PENGANUGERAHAN PREDIKAT WBK/WBBM



APRESIASI PENGANUGERAHAN PREDIKAT WBK/WBBM



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
JAWA TIMUR

GEDUNG KEUANGAN NEGARA SURABAYA II LANTAI 8, JALAN DINOYO NO. 111 SURABAYA 60256; TELEPON: (031) 5669047; FAKSIMILE: (031) 5615395

NOTA DINAS
NOMOR ND-480/WKN.10/2021

Yth : 1. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo
2. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang
3. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember
4. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pamekasan
5. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun

Dari : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur

Sifat : Segera

Lampiran :

Hal : Replikasi Inovasi Layanan Lelang KPKNL Surabaya

Tanggal : 26 April 2021

Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala KPKNL Surabaya Nomor ND- 273/ WKN.10/ KNL.01/2021 hal Replikasi Inovasi Layanan KPKNL Surabaya Dalam Rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, dengan ini kami sampaikan hal - hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa KPKNL Surabaya saat ini telah membuat beberapa inovasi layanan yaitu berupa Layanan *eform* pasca lelang yang digunakan sebagai alternatif layanan bagi pengguna jasa/ pembeli lelang untuk permohonan kuitansi pembayaran harga lelang, permohonan kutipan risalah lelang, dan permohonan bukti setor Pajak Penghasilan (PPH) yang berbasis Elektronik Form.
- 2 Selain itu terdapat Pojok SKPT yaitu penyediaan sarana dan prasarana pengurusan pendaftaran Surat Keterangan Pendaftaran Tanah secara online untuk kepentingan lelang pada APT KPKNL Surabaya yang dapat digunakan untuk memudahkan para pemohon lelang dalam mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pengurusan SKPT online.
- 3 Adapun inovasi tersebut telah dilakukan pengujian dan penelitian oleh Bidang Lelang, dan dinyatakan layak untuk dipergunakan guna menunjang Tusi pada KPKNL serta sebagai salah satu upaya peningkatan layanan kepada *stake holder* .
- 4 Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, kami meminta kepada para Kepala KPKNL agar dapat mereplikasi inovasi dimaksud dan mengenai informasi terkait fitur serta tata cara penggunaannya dapat berkomunikasi langsung dengan KPKNL Surabaya.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik
Tugas Agus Priyo Waluyo

Tembusan:

1. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya



2. Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi
3. Kepala Bidang Lelang



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
JAWA TIMUR

GEDUNG KEUANGAN NEGARA SURABAYA II LANTAI 8, JALAN DINOYO NO. 111 SURABAYA 60256; TELEPON: (031) 5669047; FAKSIMILE: (031) 5615395

NOTA DINAS
NOMOR ND-124/WKN.10/BD.05/2021

Yth : Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi
Dari : Kepala Bidang Lelang
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Hasil Penelitian dan Pengujian Inovasi Layanan Lelang KPKNL Surabaya
Tanggal : 22 April 2021

Menindaklanjuti Nota Dinas Saudara Nomor ND-182/WKN.10/BD.06/2021 hal Penelitian dan Pengujian Inovasi Layanan Lelang KPKNL Surabaya dan hasil pelaksanaan tugas sesuai Surat Tugas dari Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur Nomor ST-70/WKN.10/2021 tanggal 20 April 2021, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Layanan *eform* untuk layanan pasca lelang dan Pojok SKPT *online* merupakan inovasi layanan lelang sebagai upaya peningkatan pelayanan terhadap pengguna layanan / *stakeholder* KPKNL Surabaya;
2. Hasil dari penelitian dan pengujian yang dilakukan, Bidang Lelang memberikan saran untuk inovasi layanan lelang dari KPKNL Surabaya, antara lain sebagai berikut:
 - a. Layanan *eform* pasca lelang untuk layanan Kutipan Risalah Lelang, agar Kepala Seksi Lelang juga diberikan akses pada *eform*. Agar Kepala Seksi Pelayanan Lelang dapat memantau permintaan dari *stakeholder* yang mengajukan permohonan;
 - b. Pada layanan *eform*, ditambah dengan menu tanggal perkiraan pengguna jasa dapat mengambil produk layanan yang telah diajukan;
 - c. Untuk memberikan layanan yang maksimal kepada *stakeholder*, layanan Pojok SKPT *Online*, agar jam layanan ditambah, dimulai pukul 08:00 s.d. 15:00 pada hari kerja biasa. Hal ini mengingat tingginya frekuensi penggunaan jasa SKPT *Online* dimaksud;
 - d. Kepala KPKNL Surabaya agar menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk 2 (dua) inovasi layanan lelang dimaksud serta dilengkapi dengan Bagan Alir (*flowchart*);
 - e. Kepala KPKNL Surabaya menambah inovasi layanan lelang validasi BPHTB dengan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai replikasi dari inovasi KPKNL Madiun.
3. Atas hasil penelitian dan pengujian yang telah kami lakukan atas inovasi layanan lelang KPKNL Surabaya dimaksud, Bidang Lelang memberikan rekomendasi, inovasi layanan lelang dari KPKNL Surabaya **dapat disetujui** dan **dapat direplikasikan** ke KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Timur.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik
Ahid Iwanudin

Tembusan:



1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur
2. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya



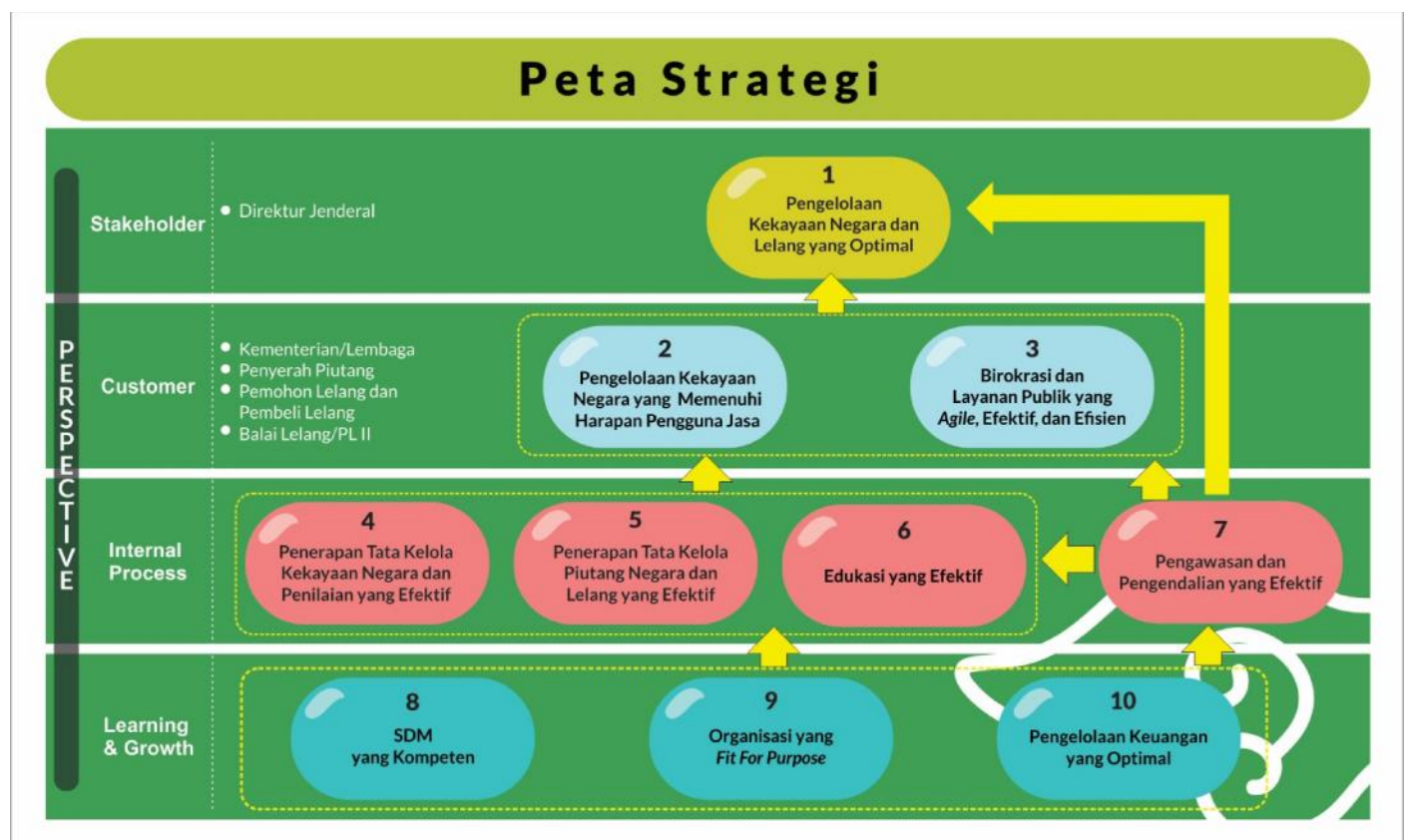
KONTRAK KINERJA
NOMOR 7/KN.22/2021

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURABAYA
KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2021

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURABAYA
KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	1a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	62%
		1b-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)	100%
		1c-CP	Persentase Penurunan Nilai <i>Outstanding</i> Piutang Negara	100%
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP	Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	87
		2b-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
3.	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien	3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,6
4.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif	4a-CP	Persentase Bidang tanah BMN yang disertifikasi	100%
		4b-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
		4c-CP	Deviasi Ketergunaan hasil Penilaian	22%
5.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	5a-CP	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	100%
		5b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	35%
		5c-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%
		5d-CP	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	12,5%
6	Edukasi yang Efektif	6a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	96
7.	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	7a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%
8.	SDM yang Kompeten	8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
9.	Organisasi yang Fit For Purpose	9a-N	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBBM	85
		9b-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	75
		9c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	80
10.	Pengelolaan Keuangan yang Optimal	10a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%

Program/Kegiatan	Anggaran
Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	748.742.000.
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	57.167.000
2. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	44.986.000
3. Pengelolaan Aset	646.589.000
4. Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara	-
5. Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	-
6. Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	-
Dukungan Manajemen	1.648.032.000
1. Legislasi dan Litigasi	165.598.000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	1.438.067.000
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	31.919.000
4. Pengelolaan Organisasi dan SDM	-
5. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	12.448.000
6. Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	-

Surabaya, 29 Januari 2021

Plt. Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur,

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Surabaya

Syamsudin

Andy Pardede

RINCIAN TARGET CAPAIAN KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURABAYA
KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TAHUN 2021

No	SS, IKU		Target						
			Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal								
	1a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	-	50%	50%	55%	55%	62%	62%
	1b-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
	1c-CP	Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa								
	2a-CP	Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	87	87	87	87	87	87	87
	2b-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
3	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien								
	3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	-	-	-	-	-	4,6	4,6
4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif								
	4a-CP	Persentase Bidang tanah BMN yang disertifikasi	-	20%	20%	60%	60%	100%	100%
	4b-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	15%	45%	45%	75%	75%	100%	100%
	4c-CP	Deviasi Ketergunaan hasil Penilaian	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif								
	5a-CP	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
	5b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	15%	20%	20%	25%	25%	35%	35%
	5c-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
	5d-CP	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%
6	Edukasi yang Efektif								
	6a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	-	96	96	-	96	96	96
7	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif								
	7a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	-	40%	40%	-	40%	85%	85%
8	SDM yang Kompeten								
	8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%

No	SS, IKU		Target						
			Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
9	Organisasi yang <i>Fit For Purpose</i>								
	9a-N	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBBM	-	-	-	-	-	85	85
	9b-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	-	-	-	-	-	75	75
	9c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	80	80	80	80	80	80	80
10	Pengelolaan Keuangan yang Optimal								
	10a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%

Surabaya, 29 Januari 2021

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
Dan Lelang Surabaya

Andy Pardede

Sasaran Kerja Pegawai

No	I. PEJABAT PENILAI		No	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	
1	Nama	Syamsudin	1	Nama	Andy Pardede
2	NIP	196305201983111002	2	NIP	196901121995011001
3	Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina Tk.I/IVb	3	Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina Tk.I/IVb
4	Jabatan	Plt. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur	4	Jabatan	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya
5	Unit Kerja	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur	5	Unit Kerja	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya

No	III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN	ANGKA KREDIT	TARGET			
			KUANTITAS / OUTPUT	KUALITAS / MUTU	WAKTU	BIAYA
1	Meningkatkan Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	-	62%	100	12 bulan	-
2	Meningkatkan Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)	-	100%	100	12 bulan	-
3	Menurunkan Nilai <i>Outstanding</i> Piutang Negara	-	100%	100	12 bulan	-
4	Mewujudka Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	-	87	100	12 bulan	-
5	Meningkatkan Realisasi Pokok Lelang	-	100%	100	12 bulan	-
6	Mewujudkan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	-	4,6	100	12 bulan	-
7	Mensertifikasi Bidang tanah BMN	-	100%	100	12 bulan	-
8	Mengimplementasikan Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	-	100%	100	12 bulan	-
9	Meningkatkan Ketergunaan hasil Penilaian	-	78%	100	12 bulan	-
10	Meningkatkan Efektivitas Penyelesaian BKPN		100%	100	12 bulan	-
11	Meningkatkan Produktivitas Lelang		35%	100	12 bulan	
12	Melaksanakan Lelang E-Auction dan E- Conventional Auction	-	92%	100	12 bulan	-
13	Meningkatkan Akurasi Data PNBP Fungsional DJKN	-	87,5%	100	12 bulan	-
14	Meningkatkan efektivitas edukasi dan komunikasi	-	96	100	12 bulan	-
15	Menindaklanjuti persetujuan pengelolaan kekayaan negara	-	85%	100	12 bulan	-
16	Mengembangan kompetensi pegawai	-	100%	100	12 bulan	-
17	Mewujudkan Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBBM	-	85	100	12 bulan	-
18	Mewujudkan Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	-	75	100	12 bulan	-
19	Melaksanaan FGD Pejabat Administrator	-	80	100	12 bulan	-
20	Meningkatkan Kualitas pelaksanaan anggaran	-	95,5%	100	12 bulan	2.396. 774.000

Surabaya, 29 Januari 2021

Pejabat Penilai,

PNS yang Dinilai,

Syamsudin
NIP . 196305201983111002

Andy Pardede
NIP 196901121995011001

INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURABAYA
KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya
1	SS: Pengelolaan kekayaan negara yang optimal IKU: Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	Optimalisasi BMN (KOIN)	1.Meningkatkan pengelolaan BMN yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi terhadap masyarakat 2. BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang terindikasi <i>underutilized/ idle</i> yang tidak sedang dimanfaatkan diajukan pemanfaatannya	12 Bulan	Tim KPKNL beranggotakan 5 orang pejabat /pelaksana.	

Surabaya, 29 Januari 2021
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya,

Andy Pardede
NIP 196901121995011001

NILAI KINERJA ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURABAYA
PERIODE TRIWULAN IV
TAHUN 2021

Kode	IKU	V/C	Target s.d. Q4	Realisasi s.d. Q4	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
	Stakeholder Perspective(25%)							28,82%	
1	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal							115,29%	
1a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/L	62%	78,31%	19%	40%	126,310%	120,00%	hijau
1b-CP	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	P/M	100%	104,18%	14%	30%	104,181%	104,18%	hijau
1c-CP	Persentase Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2017)	P/M	100%	164%	14%	30%	163,85%	120,00%	hijau
	Customer Perspective(15%)							17,55%	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							114,02%	
2a-CP	Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	P/H	87,00	92,58	11%	44%	106,41%	106,41%	hijau
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	P/M	100%	129,22%	14%	56%	129,22%	120,00%	hijau
3	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien							120,00%	
3a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	E/M	5%	4,90	21%	100%	10652,17%	120,00%	hijau
	Internal Process Perspective (30%)							31,59%	
4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif							111,99%	
4a-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	P/L	100%	102,30%	19%	43%	102,30%	102,30%	hijau
4b-CP	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/H	100%	118,54%	11%	25%	118,54%	118,54%	hijau
4c-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	22%	7,06%	14%	32%	167,91%	120,00%	hijau
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							103,84%	
5a-CP	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKNP	P/M	100%	100,00%	14%	25%	100,00%	100,00%	hijau
5b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	35,00%	30,48%	14%	25%	87,08%	87,08%	kuning
5c-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	P/M	92,00%	99,62%	14%	25%	108,28%	108,28%	hijau
5d-CP	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	P/M	12,50%	0,25%	14%	25%	198,00%	120,00%	hijau
6	Edukasi yang efektif							101,83%	
6a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	P/M	96	97,76	14%	100%	101,83%	101,83%	hijau
7	Pengawasan dan pengendalian yang efektif							103,49%	
7a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	P/M	85%	87,97%	14%	100%	103,49%	103,49%	hijau
	Learning & Growth Perspective (30%)							33,63%	
8	SDM yang kompeten							119,53%	
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	100%	119,53%	14%	100%	119,53%	119,53%	hijau
9	Organisasi yang fit for purpose							116,25%	
9a-N	Nilai pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK/WBBM	P/M	85	95,56	14%	33%	112,42%	112,42%	hijau
9b-N	Nilai hasil review pengelolaan kinerja	P/M	75	87,24	14%	33%	116,32%	116,32%	hijau
11c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	P/M	80	97,67	14%	33%	122,08%	120,00%	hijau
10	Pengelolaan Keuangan yang Optimal							100,50%	
10a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	95,5%	95,98%	14%	100%	100,50%	100,50%	hijau
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)								111,59%	hijau

Mengetahui,
Kepala KPKNL Surabaya

Kepala Seksi Kepatuhan Internal
Selaku Mitra Manajer Kinerja Organisasi

Andy Pardede
NIP 196901121995011001

Arif Yuliono
NIP 197507051999031001